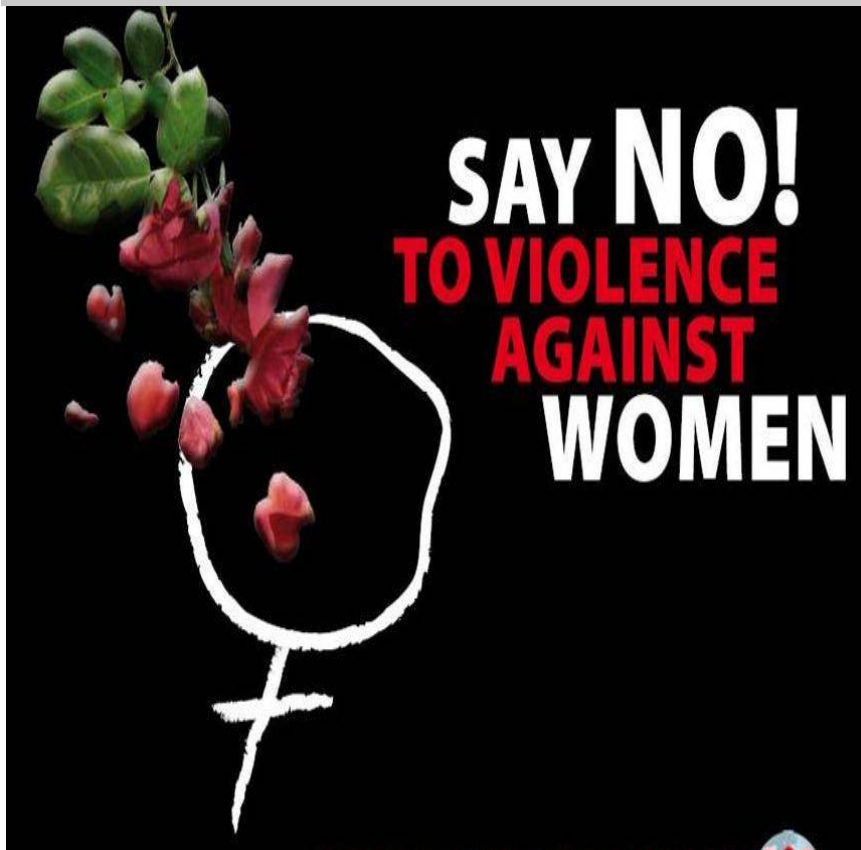


***HUKUMAN KEBIRI
DALAM KAJIAN FIKIH
MODERN INTERDISIPLINER***



**TimKajianHukum Islam Kontemporer
Sambutan : Rektor UIN Raden Intan Lampung**

HUKUM KEBIRI DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER

ISBN :978-602-51070-9-2

Penulis :

**Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Editor :

**Tim Diskusi Dosen Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Penyunting :

**Tim Diskusi Dosen Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Design sampul dan tata letak :

Mahdi

Penerbit:

CV. GEMILANG

Redaksi:

**Jl. Trunojoyo No. 30
Surabaya - Jawa Timur
0852 3194 5055
gemilangpublish@gmail.com
www.gemilangpublishing.com**

Cetakan pertama, Februari 2018

**Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit**

DAFTAR ISI

COVERi
DAFTAR ISI ii
PENGANTAR REDAKSI iii
SAMBUTAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
iv

PENDAHULUAN

(IJTIHAD KEINDONESIAAN UNTUK MEMBERANTAS
KEJAHATAN KEMANUSIAAN: Respon Terhadap Hukuman
Kebiri

Bagi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan)

Alamsyah 1

PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM

H. Khairuddin..... 25

PRO DAN KONTRA TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Kajian Politik Islam)

Iskandar Syukur..... 45

KEBIRI DALAM KAJIAN KOMNAS PEREMPUAN

Hj. Dewani Romli..... 63

HUKUM KEBIRI DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-*
SYARI'AH

H. Mohammad Rusfi 87

HUKUMAN KEBIRI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA
(Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif)

Hj. Zuhraini..... 133

**HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

H. A. Khumaidi Ja'far.....155

**MENANTI EFEKTIFITAS PERPPU KEBIRI DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Marwin..... 163

**MENAKAR KEBIJAKAN HUKUM KEBIRI TERHADAP
PELAKU FEDOFILIA**

Abdul Qodir Zaelani..... 185

PENUTUP

KATA PENGANTAR

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin, Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat yang tidak pernah henti-henti meskipun hanya sesaat, sejak tertidur sampai tertidur lagi. Berkat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah hasil diskusi dosen dalam bentuk buku dengan judul **"Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih ModerInterdisipliner"**

Salawat dan salam salam kami sampaikan kepada pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengubah tata kehidupan manusia dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang beradab dan melimpah dengan ilmu pengetahuan. Beliau telah berjuang menegakkan ajaran Islam tanpa kenal putus asa, dan berkat beliau lah, dengan seizin Allah, kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan dan kebebasan berfikir seperti saat ini yang telah memukul ratakan seluruh lapisan bumi dengan keindahan ilmu tersebut.

Tim penulis sadar dalam kajian ini terdapat banyak sekali kekurangan dan atau kekeliruan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar.

Bandar Lampung, Januari 2018

Tim Editor

**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI N
RADEN INTAN LAMPUNG
“Mewujudkan Maslahat sebagai Esensi Hukum”**

Berbagai kejahatan keji dan tindak criminal yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran besar dalam masyarakat. Kejahatan berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan, bukan hanya dilakukan oleh penjahat atau orang-orang yang dinilai secara psikologis sebagai “memiliki kelainan”, tetapi banyak juga dilakukan oleh orang dekat bahkan yang masih dalam hubungan keluarga. Dalam beberapa kasus belakangan ini, tindak pemerkosaan banyak dialami oleh anak-anak di bawah umur, dan beberapa di antaranya bukan hanya diperkosa tapi juga dibunuh. Oleh karena itu tindak kejahatan biadab seperti ini harus dihentikan dan pelakunya dihukum berat.

Pemerkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan, karena korbanya bukan hanya disakiti secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis, dan bahkan banyak di antaranya yang mesti menanggung penderitaan dan stigma buruk dari masyarakat dalam jangka waktu lama. Dampak buruk perkosaan yang membawa penderitaan para korban ini sama saja dengan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, karena telah merampas hak-hak anak manusia untuk hidup aman dan nyaman.

Dalam upaya merespon tindak kejahatan dan akibatnya tersebut, maka hukum harus mampu menjawab agar kejahatan dapat dihentikan, tidak berulang terjadi dan tidak boleh semakin berkembang. Hukum harus memberikan sanksi yang tegas dan berat sehingga pelaku menjadi jera dan jaminan rasa aman bagi perempuan dapat diberikan. Jika hokum belum menetapkan bentuk hukumannya maka para ahli hokum harus segera duduk bersama untuk merumuskan bentuk hukumannya. Para petugas hukum juga harus saling bersinergi untuk menegakkan hokum tersebut dengan selurusnya guna mewujudkan rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Kajian hukuman bagi pelaku kejahatan pemerkosaan bukan hanya domain hokum positif tetapi juga menjadi wilayah

kajian hukum Islam. Perspektif hukum Islam penting dikaji karena hukum ini merupakan salah satu pilar pembentuk hukum nasional. Sejak berabad-abad silam para ulama ahli hukum Islam (*the scholar and jurist of Islamic law*) telah memberikan kontribusi pemikiran, fatwa dan putusan hukum terhadap pelaku pemerkosaan. Di samping menetapkan bentuk hukuman bagi para pelaku kriminal perkosaan, hukum Islam juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan. Oleh karena itu para ahli hukum Islam membuat beberapa kaidah hukum, antara lain berbunyi “*ad-dhararuyuzalu*” bahwa kejahatan itu harus dihilangkan, tetapi ulama juga menggarisbawahi dengan batasan “*ad-dhararulayuzalu bid dharari*” bahwa kejahatan itu tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kejahatan lain. Esensi hukum Islam menegaskan bahwa semua aturan hukum, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah swt maupun yang dirumuskan oleh manusia, adalah untuk menciptakan “*Maslahat*” atau kebaikan dan menghilangkan keburukan.

Dalam upaya menterjemahkan esensi “*Maslahat*” tersebut kedalam aturan hukum konseptual dan operasional, maka para akademisi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung duduk bersama untuk berdiskusi yang hasilnya tertuang dalam tulisan di buku ini. Selamat menikmati dan semoga ada manfaatnya. Aamiin

Bandar Lampung, Januari 2018

Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

**IJTIHAD KEINDONESIAAN UNTUK MEMBERANTAS
KEJAHATAN KEMANUSIAAN***
**(Respon Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan
Pemeriksaan)**

Alamsyah

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Abstrak

Di Indonesia saat ini banyak terjadi tindak kriminal pemeriksaan terhadap perempuan dan anak yang diikuti dengan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap korbannya. Oleh karena itu harus ditetapkan formula hukum yang dapat mencegahnya dan salah satu alternatifnya adalah hukuman suntik kebir. Dalam konteks keindonesiaan, hukuman kebir ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai hukuman tambahan dan pemberatan bagi para pelaku kejahatan pemeriksaan atau tindak kekerasan seksual yang berat dan sadis, setelah dijatuhi hukuman pokok penjara sebelumnya. Jika dianalisis dengan kajian hukum Islam, maka hukuman suntik kebir termasuk persoalan *ijtihadiah*. Walaupun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, namun hukuman suntik kebir dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk ijtihad empiris dalam upaya pencegahan terjadinya tingkat kekerasan dan kejahatan seksual yang kejam dan marak belakangan ini di Indonesia. Hukuman kebir memang telah menjadi tradisi yang banyak diterapkan oleh beberapa negara Barat dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Sebagai sistem yang terbuka, dialektis dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, maka syari'at Islam dapat mengakomodir tradisi luar seperti hukuman kebir ini sebagai salah satu bentuk hukuman pidana *ta'zir* atau hukuman tambahan pemberatan sehingga hukuman kebir tidak perlu dipertentangkan dengan syari'at Islam dan juga tetap dapat diterapkan di Indonesia.

Kata kunci: *hukuman kebir, ijtihad, hukuman pokok, hukuman tambahan.*

*Disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah Tanggal 10 Agustus 2016

A. Pendahuluan

Belakangan ini diberitakan dengan marak tentang terjadinya banyak pemerkosaan di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan tindakan kriminal yang sadis dan kejam. Korban bukan hanya diperkosa oleh satu orang tetapi ada yang disekap selama beberapa hari dan diperkosa secara bergiliran oleh beberapa orang bahkan belasan orang. Banyak korban perkosaan, yang umumnya perempuan atau anak-anak perempuan, kemudian bahkan dibunuh dan dibuang di hutan, atau dibakar, atau dirusak alat vitalnya, atau dimutilasi. Tragedi pemerkosaan yang diikuti dengan kejahatan penganiayaan atau pembunuhan ini ibarat gunung es karena masih banyak atau lebih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Sebagian pelaku ada yang masih berkeliaran karena belum ditangkap tetapi banyak pula yang sudah tertangkap tetapi dijatuhi hanya dengan hukuman ringan atau minimal.

Islam datang untuk menghapus segala bentuk tirani dan perbuatan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia seperti pemerkosaan ini. Oleh karena itu segala tindakan yang merusak, menodai, melecehkan dan menjatuhkan nilai-nilai kehormatan harus dihentikan dan pelakunya harus dijatuhi hukuman berat. Tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual memberi dampak yang sangat besar, baik secara psikologis, fisiologis, sosiologis, ekonomi, dan kultural, baik bagi korban, keluarga maupun anak yang akan dilahirkan. Oleh karena perkosaan adalah perbuatan bejat, kejam dan tidak

berprikemanusiaan, apalagi yang diikuti dengan penganiayaan dan pembunuhan, maka sanksi hukumannya bisa berlipat, harus lebih berat, menjerakan atau mendidik agar tidak ditiru orang lain.

Sanksi dalam KUHP bagi pelaku pemerkosaan memang dinilai masih terlalu ringan sehingga tidak banyak mengurangi kasus tindak pidana seperti ini dalam masyarakat. Oleh karena itu hukuman tambahan atau pemberatan perlu ditambahkan ke dalam KUHP, yang diambil dari nilai-nilai agama, budaya dan kemajuan sains dan teknologi. Salah satu sanksi hukuman pemberatan atau hukuman tambahan yang diusulkan oleh pemerintah bagi pelaku kejahatan pemerkosaan yang kejam dan sadis adalah hukuman kebiri dengan suntikan yang berlakunya temporer, bukan kebiri dengan pemotongan alat kelamin yang permanen. Usulan ini untuk sementara diberlakukan dalam bentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dan diharapkan nantinya dapat diterima oleh DPR RI menjadi sebuah undang-undang.

Hukuman kebiri dengan suntikan ini ternyata menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Para aktivis perlindungan anak, sebagian pakar hukum dan pegiat HAM mendukungnya, namun sebagian pakar hukum lainnya dan kalangan dokter Indonesia menolaknya. Sedangkan dari kalangan ilmuwan atau ulama dan lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, belum ada pernyataan sikap resmi tentang itu. Dengan demikian legalitas hukuman kebiri dengan alat suntik

ini perlu dikaji mendalam, terutama dari perspektif hukum Islam. Oleh karena hukuman kebiri dengan suntik belum diatur secara tegas dalam al-Qur'an, Hadis dan fikih ulama klasik, maka persoalan ini termasuk kajian baru yang bersifat ijtihadiyah, yang harus dilakukan dengan berbagai aspek dan pendekatan. Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis legalitas hukuman kebiri sebagai sebuah ijtihad di Indonesia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup yang aman dan memberantas mudarat tindak kejahatan pemerkosaan yang sadis, kejam dan banyak terjadi dalam masyarakat.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Syari'at; Dialektis dan Kultural

Ada dua model ijtihad yang ditempuh ulama dalam penetapan hukum, yaitu deduktif (*istintaji*) dan induktif (*Istiqra'i*). Metode pemikiran deduktif lebih banyak digunakan oleh para mujtahid dan fuqaha' Hanafiyah sehingga lebih populer dan bahkan ada yang menganggapnya paling benar. Pemikiran deduksi inilah yang populer digunakan dalam ilmu lughah, nahwu, sharaf, balaghah, sejarah, sains, dsb, yang semua ilmu tersebut menjadi basis penafsiran al-Qur'an dan memahami Hadis Nabi, sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan jika beragam kitab tafsir, mulai *al-Tahabari* era klasik sampai *al-Misbah* era moderen, dari *al-Risalah* imam al-Syafi'I sampai dengan *Maqashid al-Syari'ah*-nya Ibn Asyur at-Tunisi, dipenuhi dengan penafsiran ala deduksi kebahasaan.

Ilmu ushul al-fiqh yang merupakan cabang penafsiran al-Qur'an dan Hadis pun didominasi pola deduktif, seperti metode ijma', qiyas, istihsan, dsb. Deduksi seperti inilah yang dikritik al-Jabiri sebagai *Burhani* dan *Bayani* yang terkotak-kotak dan saling menafikan. Pola deduksi Bayani digunakan oleh ulama Ahlussunnah dalam menyusun teologi kalam dan oleh Syafiiyah dalam menyusun fiqh tekstualnya. Sedangkan deduksi Burhani diperagakan oleh ulama Muktazilah dalam menyusun teologi rasionalnya dan ulama Hanafiyah dalam menyusun fiqh *istihsan*-nya.

Pola deduktif memang unggul dalam proses penetapan hukum yang cepat dan searah, namun tumpul dalam merespon perubahan sosial budaya dan sains teknologi, dan di sinilah keunggulan metode ijtihad empiris induksi yang banyak terabaikan selama ini. Ijtihad empiris tidak mengambil sikap apriori dan curiga pada tradisi dan hukum yang diterapkan dalam masyarakat tertentu, tetapi menganggapnya sebagai salah satu bentuk yang layak dipertimbangkan untuk diteruskan. Ijtihad empiris *istiqla'i* menganggap berbagai tradisi, budaya, kebiasaan, sebagai hikmah kebaikan yang dapat dilakukan dan diamalkan oleh siapapun dan di manapun, sepanjang tidak bertentangan secara nyata dengan nilai-nilai fundamental tauhid dan syariat. Dengan sikap demikian maka hukum apapun pada prinsipnya masih dianggap sebagai kebaikan yang membawa keadilan dan pantas untuk diterima. Oleh karena substansi

hukum adalah keadilan dan nilai tertinggi dalam syari'at juga adalah keadilan maka hukum apapun yang membawa misi keadilan adalah juga bagian syari'at, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian syariat harus memiliki karakter terbuka (*opened sharia*) untuk bertemu dengan sistem hukum lainnya. Syari'at bisa berdialog dengan berbagai tradisi dan sistem manapun. Inilah karakteristik syari'at yang dialektis, yakni dapat menerima, memberi dan saling menyempurnakan dengan berbagai sistem kehidupan manapun, sehingga nanti akan lahir syari'at Islam yang bentuk dan aturannya sesuai dengan karakter masyarakat di mana syari'at itu hidup, sesuai dengan kondisi geografis, demografis dan kultur yang berjalan. Dialektika syariat dengan kultur atau budaya dan kondisi lokal inilah yang menyebabkan hukum Islam pernah jaya dengan melahirkan ratusan mazhab sesuai kondisi kedaerahan pada abad ke 3 H silam.

Abu Ishak as-Syathibi dalam karyanya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, menegaskan bahwa ayat-ayat *makkiyah* yang berisi pokok-pokok ajaran Islam atau *maqashid syari'ah* merupakan ayat-ayat prinsip (*ushul*) sedangkan ayat-ayat *madaniyah* merupakan ayat-ayat teknis dan cabang atau *furu'*.¹ Aturan dalam ayat-ayat madaniyah, seperti mu'amalah, kekeluargaan, perang, dll, merupakan penjabaran dan pelaksanaan yang bersifat kontekstual. Implementasinya bersifat

dinamis dan tidak kaku sehingga harus dipahami dan tunduk kepada ayat-ayat makkiyah yang membawa ajaran Islam substansial dan fundamental. Bentuk-bentuk hukuman pidana (*had jarimah*) termasuk kategori aturan yang ditetapkan dalam ayat-ayat *madaniyah* sehingga pelaksanaannya tidak boleh kaku, baik bentuk, jumlah maupun macamnya. Bentuk-bentuk hukuman pidana bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, baik bentuk hukumannya maupun jumlahnya, sedangkan fondasi dan substansi hukuman itu sendiri tetap abadi, yaitu nilai- penegakkan keadilan, persamaan dan kemaslahatan. Dalam dinamika pemahaman konteks ayat *makkiyah* – *madaniyah* dan substansi – implementasi inilah kita harus memahami keberadaan hukum kebiri saat ini.

Dalam sejarah proses turunnya wahyu, ternyata muatan ajarannya selalu mengedepankan karakter saling memberi, mengurangi, mengisi dan melengkapi. Islam tidak datang dengan membawa aturan yang murni dari langit, yang asing bagi masyarakat saat itu, atau sesuatu yang baru sama sekali. Semua aturan syari'at yang ditetapkan oleh wahyu merupakan kelanjutan dari tradisi atau syari'at umat sebelumnya, baik dari masyarakat Arab Jahiliyah pra Islam, Yahudi, Nasrani, dsb. Walaupun ada perbedaan maka sifatnya lebih banyak berupa pengembangan atau penyempurnaan dari sistem kehidupan

¹As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushulis Syari'ah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) juz II, h. 1

sebelumnya. Dialektika hukum seperti inilah yang dinamakan tesis, anti tesis dan sintesis.

Dalam konteks dialektika tradisi dan kesinambungan syari'at inilah kita harus memahami sistem pemidaanaan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan keberadaan hukuman kebiri untuk memberantas kejahatan pemerkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan yang sadis dan banyak terjadi saat ini.

2. Membangun Syariah Progressif dan Humanis

Kaum Mu'tazilah menyatakan akal murni manusia mampu menangkap kebenaran serta membedakan antara baik dan buruk walaupun wahyu tidak ada yang turun. Jadi manusia diberi beban (*taklif*) bukan karena ada atau tidak ada wahyu petunjuk tetapi karena sudah diberi kemampuan akal untuk berpikir. Dengan kemampuan berpikir tersebut maka manusia diberi pula kemampuan berijtihad menetapkan aturan hukum dan jenis hukuman bagi yang melanggarnya. Pola pemikiran Mu'tazilah yang diikuti oleh banyak ulama mazhab Hanafi ini lebih progressif, lebih cepat merespon dan menjawab persoalan yang terjadi, termasuk dalam merespon hukuman kebiri suntik sebagai salah bentuk hasil ijtihad moderen.

Pemikiran ulama Asyariyah dan Sunni lebih pasif karena menunggu adanya wahyu atau dalil dalam menetapkan hukum. Analogi atau qiyas pun harus ada hukum dalam dalil yang dapat dijadikan tempat qiyas (*maqis 'alaih*). Atas dasar ini maka muncul kaidah "*Tidak ada hukum bisa dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan orang berakal sebelum datang nash*

menetapkannya”². Dalam ilmu hukum, pola pemikiran hukum Asy’ariyah ini disebut dengan aliran hukum positif. Pola hukum ini sulit dan lambat merespon persolan karena selalu menunggu adanya dalil atau regulasi yang mengatur. Jika tidak ada maka tidak dapat diputuskan hukumnya. Hukum positif yang pasif ini tentu lambat dan sulit menerima kehadiran hukuman kebiri suntik karena hukuman kebiri tidak ada dalam teks dalil syari’at Islam atau undang-undang.

3. Sejarah, Proses dan Perkembangan Hukuman Kebiri

Sebenarnya hukuman kebiri alias kastrasi sudah berlangsung sejak zaman kuno. Victor T Cheney (2006, buku "*A Brief History of Castration*" *Second Edition*), menegaskan praktik kebiri sudah berlangsung sangat lama sejak zaman kuno. Berbagai alasan dilakukannya praktik kebiri, mulai dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dan sosial. Orang-orang yang dikebiri ternyata banyak menjadi orang kasim atau pelayan istana, bahkan jenderal seperti pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia abad ke 15 Masehi. Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 orang dikebiri. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani.

²Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, juz I, h. 8

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya. "Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron. Hormon testosteron tidak hanya berpengaruh bagi dorongan seksual pria, melainkan perempuan juga. Kalau testosteron berkurang maka dorongan seksual juga berkurang bahkan hilang sama sekali.

Sedangkan kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis melainkan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.

Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi. Dengan demikian kebiri kimiawi

tidak bersifat permanen, namun sementara saja. Kebiri kimia memang tidak "menyembuhkan" perilaku penjahat seksual namun diharapkan menakuti sehingga menuntun kejahatan seksual.³

4. Kajian Teks dan Konteks Hukuman Pelaku Pemerkosaan dalam Islam

Bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan (hubungan seksual secara paksa atau zina dengan kekerasan) tidak ditetapkan dan diatur secara eksplisit dalam berbagai teks al-Qur'an. Teks ayat al-Qur'an hanya menetapkan hukuman bagi pelaku profesi zina atau pelaku zina yang dilakukan atas dasar sukarela, bukan zina yang dipaksakan. Sesuai konteksnya, pelaku zina sukarela atau pelaku profesi zina ini dalam al-Qur'an dinamakan sebagai *zani* (pezina laki-laki) dan *zaniyah* (pezina perempuan). Hukuman pokok atau *had* bagi pelaku profesi zina sukarela ini adalah seratus kali cambuk, sebagaimana ditegaskan dalam teks ayat 2 surat an-Nūr 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

³Seomarjati, dalam Detic.Com, edisi 15 Oktober 2015.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ..”

Dengan demikian teks-teks ayat al-Qur’an belum menetapkan secara tegas dan jelas tentang bentuk hukuman bagi pelaku zina dalam pemerkosaan. Namun dalam beberapa hadis nabi telah direkam beberapa peristiwa yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Nabi saw kepada para pelaku perkosaan, yaitu:

Satu, hukuman cambuk dan pengasingan bagi budak yang memperkosa, sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمْسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى أَقْنَضَهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

“Seorang budak laki-laki milik khalifah telah memperkosa dan merusak keperawanan seorang budak perempuan yang juga milik khalifah. Maka budak pemerkosa itu dicambuk oleh khalifah Umar (sebanyak 50 kali) dan dibuang selama setengah tahun, sedangkan budak perempuan tsb tidak dihukum karena dia dipaksa”.

(Hadis riwayat imam Bukhāri bab 899 nomor 1 dan oleh Malik dalam *al-Muwaththā’* nomor 1302).

Dua, hukuman mati dengan cara rajam bagi pelaku perkosaan, berdasarkan hadis nabi sbb:

أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ

“Pada zaman nabi SAW ada seorang perempuan yang pergi salat, namun di tengah jalan ia dihadang seorang laki-laki, lalu ditelanjangi dan diperkosa. Perempuan itu lalu berteriak dan si pemerkosa melarikan diri. Lalu lewat seorang laki-laki lain yang membawanya kepada beberapa sahabat muhajirin. Mereka lalu mengejar dan menangkap si pemerkosa lalu membawanya ke hadapan Nabi SAW. Laki-laki itu lalu dihukum rajam setelah sebelumnya diperintahkan bertaubat dst ... ”. (Riwayat al-Tirmizi dalam Sunan-nya nomor 1373 dari ‘Alqamah ibn Wa’il al-Kindiy).

Riwayat Thabrani menyatakan :

أتى الحجاج بن يوسف برجل اغتصب اخته نفسها فقال احبسوه واسألوه من ههنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف

“Seorang laki-laki telah memperkosa (ightashab) saudara perempuannya, lalu dilaporkan kepada al-Hajjāj dan dipenjara. Seorang sahabat nabi bernama ‘Abdullah ibn Abi Mutharraḥ yang ditanya tentang hukumnya lalu menyatakan bahwa Rasul SAW telah bersabda “barang siapa melanggar batas dua kehormatan seseorang maka bunuhlah dia”.

Salah seorang periwayatnya bernama Rifdah ibn Qudhā’ah dinilai dha’if oleh mayoritas muhaddisin namun dinilai siqah oleh Hisyām ibn ‘Ammār.⁴ Riwayat serupa juga diperkuat oleh riwayat Ibn ‘Abbās sebagai *syāhid*.⁵ Dengan demikian kualitasnya cukup kuat sebagai dasar hukum dalam Islam.

Riwayat Nasā’i (3280), Ahmad (IV/14633), Abu Dāwud (4457bab 27), Tirmizi (1367 bab 25), Ibn Mājah (2607), dll, dari *Al-Barrā’ ibn ‘Azib* yang mempertega bahwa mengawini mahram (istri bapak) saja tidak boleh apalagi memperkosanya. Lihat hadis sebelumnya.

Sebagai perbuatan kekerasan yang menyakiti dan mencederai, maka pelaku perkosaan dapat dikenakan hukuman tambahan (*uqubah tab’iyah*) berupa qisas maupun diyat berupa denda yang disita dari harta milik pelaku untuk diberikan sebagai kompensasi kepada korban, baik aspek kejiwaan, jasmani, biaya kehamilan, melahirkan dan hadhanah. Ini

⁴Al-Asqallāni, *Taqrīb al-Tahzīb*, juz I, h. 210.

dipahami dari riwayat al-Nasa'i, dll, dari al-Barrā' ibn 'Azib di atas. Jadi denda ini tidak sekedar *mahar* seperti anggapan sebagian fuqaha'.⁶

Dari kajian teks dan konteks ayat al-Qur'an dan beberapa teks hadis di atas dapat dipahami bahwa pelaku kejahatan perkosaan bisa dikenakan dakwaan tindak pidana berlapis dan sanksi hukumannya pun juga berlipat, yaitu dikenakan hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) dan hukuman tambahan/pemberatan (*uqubah tab'iyah*). Penjelasannya sbb:

- a. Sebagai pelaku perbuatan seksual yang haram, tidak sah atau zina, maka pelaku perkosaan dikenakan hukuman pokok (*the main punisment* atau *uqūbah asliyah*). Berdasarkan teks al-Qur'an di atas maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk. Hukuman cambuk seratus kali inilah yang ditetapkan kemudian oleh banyak para fuqaha' dalam hukum pidana Islam klasik (*fikih jinayah*). Jika dipahami dalam konteks kekinian dan keindonesiaan maka hukuman seratus kali cambuk tersebut dapat diganti dengan hukuman penjara. Sesuai dengan teori pidana *Zawajir* yang dikemukakan oleh KH Ibrahim Hosen, LML, hukuman pidana seperti hukuman cambuk termasuk hukuman untuk mendidik dan membuat jera, bukan hukuman untuk balas dendam. Sebagai hukuman *zawajir*, maka pelaksanaan hukuman cambuk tidak harus

⁵Lihat Ibn al-Qayyīn al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995) juz V, h. 10-11.

⁶Lihat Muhy al-Dīn al-Nawawī, *al-Majmū'*, juz XXI, h. 56

harfiyah, tetapi dapat diganti dengan hukuman lain yang substansinya juga dapat mendidik, menakuti dan membuat jera, seperti hukuman penjara. Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan, hukuman cambuk dapat diganti dengan hukuman penjara.

- b. Sebagai pelaku zina perkosaan yang diikuti perbuatan kekerasan yang menyakiti, mencederai bahkan membunuh kaum perempuan dan anak, maka pelaku zina perkosaan dapat dikenakan hukuman tambahan pemberatan (*uqubah tab'iyah*). Bentuk-bentuk hukuman tambahan atau *ta'zir* ini ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan atau perundang-undangan. Dalam kajian fikih jinayat klasik, hukuman tambahan ini bisa berupa denda atau *diyat*, bisa berupa hukuman pengasingan, bahkan bisa sampai kepada hukuman mati sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis di atas.

Hukuman *diyat* adalah denda yang diambil dari harta milik pelaku untuk diberikan sebagai kompensasi kepada korban, baik aspek kejiwaan, jasmani, biaya kehamilan, melahirkan dan hadhanah. Denda ini bukan sebagai *mahar* dari pemerkosa untuk mengawini perempuan korban yang diperkosanya.

Jika perkosaan dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan massal, maka sanksi hukumannya lebih berat dari sekedar perkosaan perorangan. Dalam pandangan KH. Husein Muhammad, hukuman perkosaan jenis ini bukan rajam yang telah mansukh, melainkan had *hirabah* karena pelakunya telah

melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji.⁷ Dengan mengutip pandangan Ibn Hazm, ia mengatakan bahwa pelaku *hirābah* (*muhārib*) adalah orang yang merasa dirinya perkasa, menakuti orang lain, melakukan kerusakan, baik dengan senjata atau tidak, pada waktu siang atau malam, di kota atau di desa, di masjid atau di istana, dst. Maka setiap orang yang menyerang orang yang lewat, atau yang melakukan pelecehan seksual, dianggap sebagai *muhārib* yang hukumannya telah diatur secara jelas, baik dihukum secara penuh atau sebagian.⁸

Dalam konteks kekinian, keindonesiaan dan berdasarkan konsep hukum *Zawajir*-nya Ibrahim Hosen, maka hukuman tambahan pemberatan bagi pelaku pemerkosaan dapat ditetapkan dalam berbagai bentuk hukuman, seperti penjara tambahan, pengasingan, denda, kerja paksa, bahkan sampai kepada hukuman mati. Dalam rangka hukuman tambahan ini maka hukuman suntik kebiri merupakan alternatif hukuman pemberatan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan yang berat, kejam dan sadis (*fedofelia*), sepanjang hukuman tersebut dilaksanakan secara profesional, aman, dan tidak permanen.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 1992) cet. I, h. 159.

⁸Pandangan ini dikutip pula oleh sebagian ulama Syāfi'iyah dan Hanafiyyah. Lihat: al-Muhallā, juz XII, h. 308, dan Abd al-Qadīr 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, juz II, h. 640.

5. Hukuman Suntik Kebiri sebagai Ijtihad Hukum Islam Ke-Indonesia-an

Hukuman suntik kebiri sebenarnya termasuk persoalan ijtihad karena tidak ada diatur, diperintahkan atau dilarang dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagai persoalan ijtihad maka status hukuman kebiri menjadi perdebatan yang menimbulkan perbedaan. Setidaknya ada dua pandangan, yaitu yang membolehkan dan yang melarang atau mengharamkan.

Kalangan anti hukuman kebiri mengajukan tiga argumen penolakan, yaitu karena kebiri merusak fisik dan mental, serta memutuskan untuk berketurunan sehingga melanggar prinsip *maqashid syar'iyah* yang menjamin keberlangsungan keturunan (*hifzhun nasl*). Ada ijma' ulama yang diklaim telah sepakat mengharamkan kebiri dan hukumannya sudah ada dalam nas-nas syari'at. Selain itu, kebiri suntik injeksi atau kimiawi mengakibatkan perubahan fisik dan perilaku laki-laki menjadi perempuan-an, padahal perilaku laki-laki menyerupai perempuan adalah haram (dimuat dalam situs *Masshar.com*, tertanggal 20 Mei 2016).

Argumen pengharaman kebiri di atas tidak tepat dan tidak kuat, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Suntik kebiri memang dapat merusak tapi sifatnya sementara saja. Jadi seorang pelaku kejahatan pemerkosaan yang disuntik kebiri akan membuat nafsu syahwat seksual atau libidonya hilang selama zat yang disuntik itu berfungsi dan akan kembali normal dalam jangka waktu tertentu. Sejalan

dengan kemajuan medis maka kerusakan tsb dapat diperkecil, dihilangkan sehingga sifatnya tidak permanen. Suntik kebiri moderen seperti yang diterapkan di beberapa negara Barat ternyata tidak membuat pelaku perkosaan yang disuntiki menjadi “mandul” permanen tetapi hanya impoten kehilangan libido sementara. Ketika zat yang disuntikkan sudah habis dan fisiknya dipulihkan kembali maka hasrat dan kemampuan seksualnya akan kembali semula.

Kebiri yang diharamkan adalah kebiri yang menyebabkan kerusakan permanen, seperti kebiri dengan cara dipotong alat vitalnya atau suntikan kimiawi yang menyebabkan kerusakan permanen, atau yang dilakukan sebagai perbuatan individu, main hakim sendiri atau sebagai perbuatan kejahatan perorangan. Namun jika dampak negatif hukuman suntik kebiri tidak permanen, hanya sementara, dapat dipulihkan lagi, dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai putusan negara atau putusan pengadilan, maka hukuman kebiri tentu menjadi legal.

Status legalitas hukuman suntik kebiri ini sama dengan vasektomi dan tubektomi dalam KB. Pada awalnya KB dengan cara vasektomi dan tubektomi adalah haram karena menyebabkan tidak dapat lagi memiliki keturunan secara paermanen. Namun kemudian dunia kedokteran menemukan bahwa dua cara KB tersebut dapat dipulihkan dan disambung lagi seperti sedia kala sehingga dapat lagi berketurunan. Atas

dasar itu maka hukum yang mulanya haram maka menjadi boleh dilakukan.

Dalam konteks ini berlaku kaidah “*al-hukm yaduuru ma’a ‘illatihi wujuudan wa adaman*”. Maksudnya, tindakan kebiri pada awalnya memang haram karena menimbulkan mudarat yang bersifat permanen, namun sejalan dengan kemajuan sains maka sifat permanen dapat diubah menjadi temporer dan pelaksanaannya lebih profesional medis, atas dasar itu maka hukum haramnya kebiri dapat berubah menjadi boleh. Perubahan fisik dan perilaku akibat injeksi zat kimia juga bersifat tidak permanen sehingga hukumnya juga menjadi boleh. Petugas hukum yang mengeksekusi hukuman kebiri harus profesional, cermat dan akurat, agar hasilnya sesuai dengan aturan dan tidak berbahaya dalam jangka panjang.

Jadi hukuman kebiri suntik tidak bertentangan dengan prinsip *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dalam maqashid syari’ah karena hukuman ini tidak memutuskan keturunan permanen tetapi hanya menghilangkan kemampuan dan hasrat seksual temporer sebagai hukuman tambahan atas kejahatan pemerkosaan sadis yang dilakukannya.

Dalam kasus khilafiyah hukuman kebiri ini berlaku kaidah “*hukmul hakim yarfa’u al-khilaf* ” artinya putusan hakim (pemerintah) menghapus perbedaan. Maksudnya jika pemerintah atau pengadilan telah menetapkan kebolehan hukuman suntik kebiri, maka perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya otomatis selesai dan tidak ada lagi.

- b. Hukuman bagi pedofelia belum ditetapkan secara tegas dalam teks al Qur'an dan as-Sunnah dan belum ada ijma' yang menetapkannya. Namun karena perilaku tersebut termasuk kategori kejahatan kemanusiaan yang berat dan sadis maka pelakunya harus dijatuhi hukuman tambahan yang berat, dan hukuman suntik kebiri adalah salah satunya. Hukuman kebiri walaupun banyak diterapkan di negara-negara Barat tetapi tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai syari'at yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan memperhatikan hak-hak korban yang menderita atau meninggal dunia.
- c. Hukuman suntik kebiri memang dikhawatirkan dapat menyebabkan perubahan suara atau tingkah laku seorang laki-laki menjadi seperti perempuan. Tapi alasan ini juga tidak tepat karena seperti dinyatakan sebelumnya bahwa dampak suntik kebiri ini hanya sementara dan tidak permanen. Selain itu, perilaku yang dilarang adalah perilaku laki-laki yang sengaja menjadi seperti perempuan, tapi jika tanpa sengaja maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya.
- d. Dalam kondisi Indonesia yang masih banyak terjadi tindak kriminal, suasana aman belum terjamin, pemerkosaan masih banyak terjadi, bahkan diikuti dengan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korbannya, maka perlindungan kepada kaum wanita dan anak-anak harus diperkuat. Terjadinya korban-korban perkosaan harus diperkecil bahkan harus

dihilangkan. Hukuman bagi pelaku kejahatan pemerkosaan yang berat, kejam dan sadis, harus dijatuhi seberatnya agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak mengikuti dan melakukannya. Pola hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pemerkosaan ini adalah hukuman yang membuat jera dan menakuti. Salah satu hukuman pemberatan alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian adalah hukuman suntik kebiri bagi pelaku pemerkosaan dengan kekerasan. Sebagai hukuman tambahan dan pemberatan, maka hukuman suntik kebiri memang alternatif yang paling sesuai untuk mengatasi kekerasan seksual. Bentuk hukuman tambahan ini bisa berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan karena yang terpenting adalah terciptanya ketertiban, keamanan dan pendidikan. Hukuman inilah yang oleh Ibrahim Hosen dinamakan sebagai hukuman *Zawajir*. Hukuman *Zawajir* lebih mengedepankan ruh dan substansi syari'at sehingga teknis pelaksanaannya lebih fleksibel dan dinamis. Sedangkan hukuman yang bersifat balas dendam dan penebusan dosa, yang pelaksanaannya sering bersifat harfiyah, maka dikenal sebagai hukuman *Jawabir*. Hukuman ini sebisanya dihindari karena penerapannya bersifat tekstual dan sangat kasuistik atau terikat dengan konteks zaman turunnya hukuman tersebut.

C. Penutup

Hukuman suntik kebiri adalah hukuman tambahan atau pemberatan setelah hukuman pokok yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual yang berat dan sadis. Walaupun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, namun hukuman suntik kebiri dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk ijtihad empiris dalam upaya pencegahan terjadinya tingkat kekerasan dan kejahatan seksual yang kejam dan marak belakangan ini di Indonesia. Jika tingkat kejahatan seksual tidak terjadi lagi atau sangat minim maka hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan dapat dicabut dan diganti dengan hukuman yang lebih ringan.

Hukuman kebiri memang telah menjadi tradisi yang banyak diterapkan oleh beberapa negara Barat dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Sebagai sistem yang terbuka, dialektis dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, maka syari'at Islam dapat mengakomodir tradisi luar seperti hukuman suntik kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman pidana *ta'zir* atau hukuman tambahan pemberatan sehingga hukuman kebiri tidak perlu dipertentangkan dengan syari'at Islam dan juga tetap dapat diterapkan di Indonesia.

Wallahu A'lam ...

D. Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Muhammad Saif al-Din, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Mustafa al-Babi wal Halabi, Kairo, 1978
- Al-Asqallāni, Ibn Hajar, *Taqrīb al-Tahzīb*, juz I, al-Mathba'ah al-Arabiyyah, Mesir, 1970
- _____, *Tahzib al-Tahzib*, juz V, Dar al-Fikr, Beirut, 1987.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi; Dirasah Naqdiyyah Tahliliyah*, Kairo, Mesir, 1993
- Abdul Karim, Khalil, *al-Juzurut Tarikhiyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, terjemah oleh Kamran, LKiS, ogyakarta, 2002
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, juz II, Mustafa al-Halabi wal Halabi wa Auladuhu, Kairo, Mesir, 1993
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS, 1992 cet. I, Yogyakarta
- Ibn Hazm, Muhammad, *al-Muhallā*, juz XII, Dar al-Fikr, Beirut, 1991
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-'Ibād*, juz II, Dār al-Fikr, Beirut, 1995
- Al-Nawawi, Muhammad Muhy al-Dīn, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, juz XXI, Dar al-Fikr, Beirut, 1991
- Abd al-Qadīr 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1975

As-Syathibi, Abu Ishak Muhammad, *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1995

Internet; Seomarjati, dalam Detic.Com, edisi 15 Oktober 2015.

**PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

H. Khairuddin

**Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung**

A. Pendahuluan

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum dalam penerapan pelaku kejahatan kekerasan seksual sejatinya masih terdapat kekurangan, utamanya dari sisi korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya, kejahatan ini semakin hari semakin menunjukkan peningkatan jumlahnya. Lihat saja dalam aturan pokoknya, bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dua pasal, *pertama*, sebagaimana diatur dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjaraselama-lamanya sembilan tahun.⁹ *Kedua*, diatur dalam pasal 290 yang menyebutkan bahwa (1) barang siapa melakukan berbuat cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa

⁹R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1994), h. 212.

umur anak itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.¹⁰

Ketentuan dalam dua pasal di atas, menyebut *frase* cabul sebagai pemicu perbuatan kejahatan, tetapi sayangnya pemaknaan *frase* cabul tersebut tidak dimuat secara proporsional dalam KUHP. Sementara untuk konteks budaya bangsa Indonesia, yang sangat memperhatikan tata kesopanan, mempersepsikan bahwa *frase* cabul adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh. Wajar, kalau kemudian dalam pemahaman orang Indonesia bahwa *frase* cabul adalah perbuatan keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam pengertian yang spesifik, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹¹

Penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur pasal 289 KUHP adalah maksimal sembilan tahun. Sementara hukuman minimalnya tidak diatur, dan inilah yang kemudian menjadi wilayah kompetensi hakim untuk menentukan berapapun yang akan diputuskannya. Oleh karena aturannya berbunyi demikian, maka kemudian siapapun tidak bisa menyalahkan berapapun yang ditetapkan oleh hakim. Posisi korban dalam hal ini tidak bisa

¹⁰*Ibid.*

tidak, memang dalam posisi lemah. Sekali lagi, karena demikian yang disebutkan dalam aturan pasal 289 KUHP.

Demikian juga penentuan sanksi hukuman berupa pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetunahan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

¹¹R. Susilo, *Op.Cit.*, h. 212.

Ternyata, setelah ada perubahan jumlah hukuman, dimana penentuan sanksi hukuman berupa pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) masih dinilai terlalu ringan dan belum berpihak kepada kepentingan korban. Atas dasar itu pula, pemerintah ingin membuat regulasi baru, berupa peningkatan jumlah sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, tidak cukup dengan pidana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi mengingat, proses revisi undang-undang, akan memakan waktu yang cukup lama, sementara kebutuhan akan aturan yang lebih tegas diperlukan mendesak, maka pemerintah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), maka dengan relatif cepat dapat diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Substansi mendasar Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah merivisi pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dengan pemberatan berupa ancaman hukuman penjara 20 (dua

puluh) tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Terkait penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat ditekisi elektronik, hingga kebiri melalui suntikan kimia.

Berdasarkan uraian singkat di atas, problem akademik yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana format pengaturan hukuman kebiri pada era pemerintahan Presiden Jokowi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif politik hukum ?

B. Politik Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak

Setiap negara memiliki politik hukum sendiri, masing-masing negara tidak sama dalam menentukan arah politik hukumnya. Ada negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis, dan ada pula yang tidak sistematis. Dengan kata lain, politik hukum itu ada yang bersifat tetap dan ada yang temporal.¹²

Perlu ditegaskan bahwa sejatinya pengertian politik hukum itu sangat beragam bervariasi.¹³ Para ahli hukum telah banyak

¹²Satya Arinanta, *Beberapa Istilah Negara Hukum*, Makalah untuk Bahan Kuliah Program Pascasarjana S2 UII, Yogyakarta, 2006, h. 6.

¹³Merumuskan definisi politik hukum sama tidak sederhananya dengan membuat definisi hukum atau sistem hukum. Artinya ia agak sulit dirumuskan dalam satu rangkaian yang dapat memberikan pengertian yang utuh tentang apa yang sebenarnya didefinisikan. Akan tetapi, sebuah tulisan yang dirangkai berdasarkan pemikiran ilmiah dapat menggunakan sebuah definisi konsep yang dibuat sendiri oleh si penulis tanpa harus terikat pada definisi-definisi yang pernah atau akan dibuat oleh orang lain. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum*, (Jogjakarta: Gama Media, 1990), h. 29

yang mencoba untuk mendefinisikan apakah politik hukum itu. Teuku Mohammad Radhie misalnya, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenal hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum perkembangan hukum yang dibangun.¹⁴ Definisi ini mencakup *ius contitutum* dan *ius constituendum*. Definisi Rahdie agak berbeda dari definisi yang pernah dikemukakan oleh Padmo Wahyono yang mengatakan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁵

Pakar hukum pidana Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai

¹⁴Teuku Mohammad Rodhi, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973, h. 3.

¹⁵Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas hokum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonsia, 1986), h. 160.

¹⁶Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke-7, Januari – Februari 1979, hlm. 15-16. Juga dalam Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20.

suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan Satjipto dari sudut pandang sosiologi hukum ini mempertanyakan banyak hal; (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. Tujuan ini bisa tunggal atau bisa juga dipisah-pisah ke dalam tujuan yang lebih spesifik; (2) cara-cara apa yang paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktu hukum itu diubah dan bagaimana caranya; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dalam menentukan pilihan tujuan, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk cara memperbaharui hukum apakah dengan perubahan total atau sebagian-sebagian.¹⁸

Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi; (1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (2) pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum-hukum serta pembinaan para anggotanya; dan (4) peningkatan kesadaran

¹⁷Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 352 – 353.

¹⁸*Ibid.*, h. 32-35.

hukum masyarakat menurut resepsi elit pengambil kebijakan.¹⁹ Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain yakni sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan dengan karakter tertentu.²⁰

Definisi menarik dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD²¹ bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai jawaban pencapaian tujuan negara.²² Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem

¹⁹Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September, 1985.

²⁰Lihat dalam Moh. Mahfud MD, "*Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum*", *Disertasi Doktor di UGM, 1993*. Di dalam kajiannya Moh. Mahfud mengemukakan bahwa perubahan-perubahan karakter produk hukum dan politik hukum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan konfigurasi politik.

²¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*. BPHN, Jakarta, 29 – 31 Mei 2006, hlm. 1-2. Lihat juga dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 13-16.

²²Terkait dengan fungsi hukum ini Soehardjo SS mengatakan bahwa dalam politik hukum, hukum itu sendiri berperan sebagai 'sarana' (*means*) untuk mencaai tujuan tertentu. Jadi, tujuannya harus jelas. Oleh karena itu

hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni *pertama*, sebagai arahan pembuatan hukum atau *Policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan *kedua*, sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Di tinjau dari segi pohon ilmiah hukum maupun dari kenyataan-kenyataan tentang studi hukum tata negara memperlihatkan bahwa studi ilmu hukum tidak dapat melepaskan diri dari politik hukum.²³ Lebih lanjut Moh. Mahfud menjelaskan dengan menggunakan metaforisme tentang letak politik hukum dalam konteks kajian ilmu hukum. Politik hukum dapat ditemukan dalam pohon ilmu hukum. Jika pohon ilmiah hukum terdiri atas; akar ilmu hukum, batang/pohon ilmu hukum, cabang ilmu hukum, ranting ilmu hukum, dan seterusnya, maka penjenisan studi hukum di Indonesia akan mencakup hal-hal sebagai berikut; *pertama*, akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan ideologi negara. Di Indonesia, akar ilmu hukum adalah Pancasila, juga Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan prinsip-prinsip dan penuntun kaedah tertentu dalam pembuatan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Studi tentang

hukum dijadikan '*means of political engineering*', Rekayasa tersebut dilakukan melalui lembaga politik, yaitu negara.

filsafat hukum merupakan bagian dari studi ilmu hukum. *Kedua*, batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon atau subsistem kemasyarakatan, seperti sosiologi, sejarah, politik, budaya, administrasi dan sebagainya yang melahirkan cabang-cabang hukum. Studi tentang sosiologi hukum, sejarah hukum, politik hukum, budaya hukum, administrasi hukum dan lain sebagainya, yang kesemuanya adalah menjadi bagian dari studi ilmu hukum. *Ketiga*, cabang ilmu hukum adalah hukum positif yang dibedakan atas berbagai bidang pokok seperti hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan sebagainya. Cabang-cabang ini kemudian melahirkan ranting-ranting ilmu hukum. Cabang hukum tata negara melahirkan ranting studi tentang lembaga-lembaga negara, hukum perundang-undangan dan sebagainya. Demikian juga cabang hukum pidana melahirkan ranting studi tentang hukum pidana umum, hukum pidana khusus, hukum acara pidana dan sebagainya.

Dari struktur pohon ilmiah hukum itu, tampak jelas bahwa studi ilmu hukum itu sebenarnya mencakup aspek di luar hukum positif, sebab hukum positif hanya mencakup cabang dan ranting-ranting. Politik hukum menjadi bagian dari studi ilmu hukum, dan jika dikaitkan dengan pohon ilmiah hukum tersebut, studi politik hukum berada pada bagian batang atau pohon ilmu hukum. Oleh sebab itu menjadi penting untuk ditekankan bahwa hendaknya studi hukum tidak terbelenggu pada pandangan

²³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*

konvensional, bahwa ilmu hukum positif atau ilmu tentang hukum yang secara formal berlaku. Sebab, pandangan seperti ini hanya dapat melahirkan orang-orang yang berfikir formal legalistik belaka, padahal yang dikehendakai adalah berfikir substansial.

Terkait politik hukum regulasi perlindungan anak dengan mengacu pendapatnya Philippe Nonet dan Philip Selznick menguraikan tipologi karakter hukum²⁴ dalam masyarakat sebagai model hukum pengaturan hukuman kebiri, yaitu, (1) hukum represif, merupakan alat kekuasaan karena ditegakkan dengan melakukan penekanan atau pemaksaan (represif) untuk kekuasaan. (2) hukum otonom, sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi (penindasan) dan melindungi integritasnya sendiri. (3) hukum responsif, merupakan sarana merespon atas realitas kebutuhan dan fenomena aspirasi masyarakat.

Dalam hubungan hukum dan politik, tipe atau model hukum represif menunjukkan karakteristik hukum itu

Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 46.

²⁴Teori tipologi hukum dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang merumuskan suatu konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang mendesak, sambil tetap mempertahankan masalah keadilan sosial,

tunduk kepada politik/kekuasaan. Hukum merupakan subbordinat dari kekuasaan. Tetapi model hukum otonom, memperlihatkan karakteristik hukum itu terpisah dari politik/kekuasaan, dalam pengertian bahwa hukum memiliki kemandirian, independen, atau tidak diintervensi oleh kekuasaan yang lebih bersifat memaksa dalam penerapan hukum. Sementara model hukum responsif, menampakkan karakteristik hukum lebih merespon kebutuhan politik dan aspirasi masyarakat.

Penjelasan relasi hukum dan politik dalam pengaturan hukuman kebiri dengan mengacu pada tipologi hukum Nonet dan Selznick diperkuat dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Moh. Mahfud MD. Menurutnya, karakter produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa

sambil tetap mempertahankan hasil-hasil pelebagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum.

disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.²⁵

Pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai bagian dari pemerintahan pada era reformasi yang tipologi sistem pemerintahannya cenderung demokratis, partisipatif dan progresif/responsif terhadap kebutuhan politik dan aspirasi masyarakat termasuk di dalamnya saat merespon bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara tajam, sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak. Pemerintahan Jokowi menilai bahwa sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak belum memberikan efek jera yang berarti, dengan indikator pelaku kejahatan ini bukannya menurun, tetapi justru meningkat secara signifikan.

Berdasarkan pertimbangan itulah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kini Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Perubahan pokok isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah dalam ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi Pasal 81, berisi :

²⁵Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum, Op. Cit.*, h. 17-18.

Pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kedua, Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketiga, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keempat, selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Kelima, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Keenam, selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Ketujuh, terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Kedelapan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan dan *kesembilan*, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut,:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. *Kedelapan*, pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan isi tulisan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya perlu diambil kesimpulan sebagai

refleksi dan sekaligus jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan adalah bahwa pembuatan peraturan perundangan-undangan baru yang sifatnya parsial, seperti merivisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam waktu yang cepat, sulit untuk dilakukan, karena banyak presedur formal yang mesti dipenuhi. Sementara, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara tajam, sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak, mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,. Pada sisi lain, pihak pemerintahan Jokowi juga menganggap bahwa sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak pada undang-undang yang ada, belum memberikan efek jera yang berarti. Oleh karena itu, kebijakan melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah langkah yang tepat dan dibenarkan secara yuridis.

Dalam konteks isi muatan Perppu yang merupakan perubahan, khususnya perubahan pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ditinjau dari aspek corak hukum sesuai dengan paradigma hukum progresif atau responsif, hal mana dasar penetapan hukum itu tidak hanya yang tersebut dalam undang-undang. Dalam bahasa lain dapat dikatakan

bahwa hukum itu tidak hanya terpaku pada adigium positivistik, hukum adalah yang terdapat dalam undang-undang. Tetapi, hal yang menarik adalah lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa terlepas masih adanya pro dan kontra, paradigma yang dipakai pemerintahan Presiden Jokowi cenderung menggunakan paradigma hukum progresif atau responsif, tidak hanya aspek kepastian hukum saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun aspek yang jauh lebih esensial adalah aspek keadilan dan kemanfaatan lahirnya suatu peraturan-undangan.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”, Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September, 1985;
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006);
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007);
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum*, (Jogjakarta: Gama Media, 1990);
- _____, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum*, (Disertasi Doktor di UGM, 1993);
- _____, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum*

- Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*. BPHN, Jakarta, 29 – 31 Mei 2006;
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonsia, 1986);
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1994);
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991);
- Satya Arinanta, *Beberapa Istilah Negara Hukum*, Makalah untuk Bahan Kuliah Program Pascasarjana S2 UII, Yogyakarta, 2006;
- Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke-7, Januari – Februari 1979;
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Teuku Mohammad Rodhi, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973;

**PRO DAN KONTRA TERHADAP HUKUMAN KEBIRI
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
(SUATU KAJIAN MENURUT POLITIK ISLAM)**

Iskandar Syukur

**Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung**

A. Pendahuluan

Sesungguhnya negara memiliki jaminan terhadap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhadap hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan Negara itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada sisi yang lain, kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sering terjadi dan melibatkan banyak korban. Kasus terbaru yang membuat orang miris dan iba adalah kasus Yy yang diperkosa oleh 14 pelaku yang mana sebagian dari pelaku merupakan anak di bawah umur. Pemerintah memandang sangat serius terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan Pemerintah juga memandang perlu melakukan terobosan, di antaranya, memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan kepada anak. Oleh sebab itu, Presiden RI, Joko Widodo telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam Perppu tersebut adalah hukuman tambahan di luar

hukuman pokok bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak (predator) seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip.

Hukuman tambahan tersebut diberikan tentu melalui proses peradilan pidana. Keputusan hakim akan menentukan apakah terdakwa diberikan hukuman tambahan atau tidak terkait dengan masalah kebiri kimia ataupun pemberian alat deteksi elektronik. Dalam mekanisme peradilan, tentunya terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hingga perkaranya inkrah. Oleh karena itu, hukuman tambahan tersebut juga dieksekusi setelah perkara hukum dari terdakwa itu inkrah. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa tetap diberikan secara normal, apakah ingin banding, dan apakah ingin kasasi.

Perppu Nomor 1 tahun 2016 merevisi Pasal 81 dan 82 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, hingga kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik (cip). Kebiri kimia diharapkan dapat menghilangkan hasrat seksual para pelaku dan cip dilekatkan pada pelaku untuk mengontrol setelah pelaku bebas dari hukuman penjara.

Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi (Jawa Pos: 22/10/2015).

Adanya hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Ada yang mendukung dengan alasan kejahatan seksual kepada anak saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga hukuman kebiri sudah sepatutnya diberikan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut. Namun ada yang kontra, dengan alasan tindakan kebiri tersebut melanggar kesepakatan internasional tentang hak asasi manusia, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara yang merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Sedangkan tulisan ini akan menguraikan tentang hukuman kebiri tersebut menurut pandangan politik Islam.

B. Pembahasan

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016

Perlindungan Anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dirubah kembali oleh (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Perppu merubah ketentuan dalam Pasal 81 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah (ayat 1 Pasal 81). (2) Hukuman pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (ayat 2). Sedangkan jika pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seperti tertera dalam ayat 1 (ayat 3). Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (ayat 4).

Kemudian Perppu ini juga menegaskan bahwa jika korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (ayat 5). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (ayat 6). Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (ayat 7). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan (ayat 8). Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak (ayat 9).

Selain itu, Perppu ini juga menyisipkan Pasal 81A di antara Pasal 81 dan Pasal 82. Menurut Pasal 81A bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok (ayat 1). Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,

social dan kesehatan (ayat 2). Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (ayat 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 4).

Selanjutnya, Perppu ini juga merubah ketentuan dalam Pasal 82. Menurut Pasal 82 dalam Perppu ini bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (ayat 1). Jika pelaku tindak pidana tersebut adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(ayat 2). Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (ayat3).

Jika tindakan pidana tersebut dapat menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) (ayat 4). pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (ayat 5), dapat juga dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (ayat 6). Pidana tambahan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan (ayat 7). Pidana tambahan tidak berlaku bagi pelaku Anak (ayat 8).

Terakhir, Perppu ini juga menyisipkan satu pasal yaitu Pasal 82A di antara Pasal 82 dan Pasal 83. Pasal 82A menegaskan bahwa tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok (ayat 1). Pelaksanaan tindakan tersebut seperti pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan (ayat 2).

2. Respons Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Kebiri

Adanya hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016, banyak respons yang muncul baik menolak atau mendukung. Respons yang menolak seperti datang dari sekertaris umumnya, PP Muhammadiyah yang tidak sepakat dengan adanya hukuman kebiri tersebut karena menurutnya hukuman kebiri akan merusak fitrah manusia dalam menghasilkan keturunan. Orang yang telah dikebiri akan akan mendapatkan cacat sepanjang hayat pada satu sisi

sedangkan pada sisi yang lain, orang tersebut tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.²⁶

Respons penolakan terhadap hukuman kebiri ditunjukkan juga oleh lembaga Komnas HAM. Melalui komisionernya, Komnas HAM merasa kecewa terhadap rencana pemerintah memilih hukuman kebiri dalam rancangan Perppu. Alasan bagi Komnas HAM bahwa pemberian hukuman kebiri tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.²⁷

Sedangkan respons yang mendukung seperti datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menanggapi dengan positif sikap tegas pemerintah dengan menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ketua KPAI mengatakan bahwa penerapan hukuman kebiri ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam upaya perlindungan terhadap anak. Respons yang sama juga ditunjukkan pula oleh ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Nahdatul Ulama (NU). Ketua umum PBNU menanggapi hukuman kebiri tersebut bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan mengatakan bahwa ia sangat setuju penerapan hukuman kebiri bagi

²⁶ (www.ilmusiana.com/2016/05/hukum-kebiri-pelaku-pemeriksaan.html, akses 10 November 2016).

²⁷ (www.ilmusiana.com/2016/05/hukum-kebiri-pelaku-pemeriksaan.html, akses 10 November 2016).

*pelaku tersebut. Bahkan, baginya hukumana mati pun bagi pelaku tersebut merupakan tindakan yang masih wajar.*²⁸

3. Hukuman Kebiri dalam Politik Islam

Politik dalam Islam identik dengan *siyasah*. *Siyâsah* secara bahasa berasal dari kata “سأس – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur atau mengurus (أمر/دبّر) (Ibn Manzhûr, t.t: 108). Sedangkan secara istilah, *siyâsah* adalah pengaturan urusan masyarakat oleh Negara dan rakyat baik di dalam maupun di luar negeri yang berdasarkan pada hukum Islam. Dengan pengertian yang lain, negara yang secara langsung melakukan pengaturan dimaksud secara praktis, sedangkan rakyat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut (An-Nabhani, 2005). Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa politik Islam meliputi dua pelaku dalam pengaturan urusan masyarakat yaitu negara dan rakyat, dan sumber legislasinya adalah hukum Islam.

Negara dan rakyat, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Macam-macam hak rakyat menurut Abu A’la al-Maududi, seperti yang dikutip oleh Djazuli (2007: 64), adalah sebagai berikut: 1. Hak perlindungan terhadap hidup, harta, dan kehormatan; 2. Hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi; 3. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; 4. Hak kebutuhan pokok hidup yang terjamin, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Sedangkan macam-macam hak perorangan, menurut Abd al-Qâdir 'Audah (1951: 195-201), di antaranya, adalah 1. Hak persamaan. 2. Hak Kebebasan. Islam mengakui hak persamaan antara semua orang, baik golongan, jenis, etnis, tuan-hamba, hakim-yang dihukumi, dan lain-lain. Namun persamaan ini perlulah untuk difahami secara konteks dan posisinya. Contohnya: lelaki dan perempuan tidak dibedakan dari segi sisi kemanusiaannya. Kalau lelaki membunuh perempuan, maka ia akan *diqishâsh*, begitu juga sebaliknya. Tapi, lelaki dan perempuan tersebut memiliki kewajiban dan hak yang berbeda, sesuai dengan konteks dan posisinya. Misalnya, perempuan hanya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta waris dibanding lelaki karena lelaki berkewajiban mencari nafkah untuk perempuan. Begitu juga dengan status muslim dan *dzimmî*. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan sama sekali, hanya saja terdapat perbedaan pada perkara yang berhubungan dengan akidah. Karena makna persamaan di sini adalah meletakkan orang muslim pada apa yang disama akidahnya, sedangkan *dzimmî* pada apa yang berbeda akidahnya. Kaidahnya di sini bahwa Islam memposisikan bahwa apa yang mereka yakini adalah hak mereka, sedangkan apa yang Islam yakini adalah milik Islam, serta memberi kebebasan pada mereka untuk menjalani apa yang diyakini mereka dengan tanpa paksaan. Sedangkan hak kebebasan dapat terbagi kepada beberapa kebebasan yaitu:

kebebasan berfikir, berkepercayaan, berbicara, dan berpendidikan.

Hukuman keberi dalam Perppu tersebut merupakan bentuk mashlahah dalam hal perlindungan terhadap hidup, harta, dan kehormatan warga Negara khususnya bagi anak-anak perempuan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah mashlahah yang menyatakan bahwa “menolak mafsadah dan mendatangkan yang mashlahat.” Secara umum dapat disebutkan bahwa hukuman keberi tersebut bertujuan menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan segala mashlahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang dapat mendatangkan bentuk keburukan bagi kehidupan manusia termasuk pemerkosaan terhadap anak. Karena itu Islam juga menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini dan hukuman keberi dapat dipahami sebagai isyarat penolakan terhadap kerusakan anak perempuan di muka bumi Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan di atas bahwa kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi dan melibatkan banyak korban. Kasus terbaru adalah kasus Yy yang diperkosa oleh 14 pelaku, sebagian dari pelaku merupakan anak di bawah umur. Pemerintah memandang sangat serius terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan pemerintah juga memandang perlu melakukan terobosan dengan membuat Perppu. Hal ini sesuai juga dengan kaidah mashlahah yang lain

yaitu “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.” kaidah ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dan seluruh pemegang kendalai kekuasaan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan harus didasarkan kepada kemashlahatan umat. Berdasarkan kaidah ini bahwa hukuman keberi dalam Perppu tersebut merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kemashlahatan warga negaranya yaitu mengayomi dan membela warga negaranya.

Sebagaimana dijelaskan juga dalam pendahuluan di atas bahwa Perppu Nomor 1 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan 82 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak (predator) dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, hingga dikebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik (cip). Kebiri kimia diharapkan dapat menghilangkan hasrat seksual para pelaku dan cip dilekatkan pada pelaku untuk mengontrol setelah pelaku bebas dari hukuman penjara.

Revisi itu dilakukan berdasarkan pada pengamatan pemerintah bahwa hukuman yang tercantum dalam UU sebelumnya (No. 23 Tahun 2002) dirasakan kurang membawa

rasa keadilan bagi anak sebagai korban pemerkosaan. Revisi tersebut sesuai dengan satu kaidah yaitu “perubahan hukum-hukum karena adanya perubahan zaman, tempat, situasi-kondisi, kebiasaan, dan tujuan-tujuan (niyat)” Dengan kaidah ini pemerintah dapat meninjau kembali keputusan dan kebijakan sebelumnya jika dinilai dan dirasakan bahwa telah terjadi perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga dirasakan kurang mendatangkan rasa keadilan.

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea* (teori tentang etika) mengatakan bahwa suatu hukum memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya” (*ius suum cuique tribuere*). Selanjutnya bagi Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*). Keadilan distributif bersifat proposional bahwa setiap orang boleh menuntut dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hak ini tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya tergantung pada faktor-faktor seperti kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya. Jadi keadilan distributif ini bukanlah kesamaan yang dituntut tetapi lebih kepada perimbangan. Keadilan distributif ini adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. (Pratasis 2014: 56)

Sedangkan keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diberikan sama kepada setiap orang terutama dalam tindakan pembetulan atau islah terhadap suatu tindakan yang salah. Keadilan ini menuntut perlakuan yang sama, bukan perimbangan, tanpa memandang faktor-faktor seperti di atas. Keadilan komutatif ini merupakan tanggungjawab hakim. Jika suatu peraturan telah dilanggar, suatu kesalahan dilakukan atau suatu kejahatan telah dilakukan, maka keadilan komutatif, melalui hakim, berusaha memberikan suatu kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang sepatutnya kepada si pelaku (Pratasis 2014: 57).

Dengan demikian, keadilan komutatif merupakan wilayah peradilan dan hukuman kebiri itu juga merupakan keadilan komutatif. Wujudnya Perppu hukuman kebiri sebagai revisi terhadap Pasal 81 dan 82 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagai bukti bahwa pelaksanaan keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara adil. Sementara kesempatan kesempurnaan hidup korban kekerasan seksual telah rusak, menyimpan cerita aib dan mengalami trauma psikis. Penambahan hukuman hingga hukuman kebiri dalam Perppu tersebut merupakan sebuah usaha mewujudkan keadilan komutatif. Menurut teori keadilan komutatif, setidaknya si pelaku kejahatan mendapat ganjaran setimpal dari tindakan yang dia lakukan karena telah merampas keperawanan, masa depan, dan kehormatan dari si korban

kekerasan seksual. Menurut Roringkon (2015: 69; Andi dan Sumangelipu 1985) bahwa tujuan hukuman pidana tidak selalu untuk memperbaiki terpidana tetapi juga untuk penjeraan (deterrent) dan pembalasan (revenge). Bagi mereka, tujuan hukuman pidana untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi warga negara yang baik dapat dilakukan jika terpidana tersebut masih ada harapan untuk diperbaiki, dan jika terpidana tersebut melakukan kejahatan atau delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homoseks, mucikari dan sejenisnya. Sedangkan untuk kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka, bagi mereka, tujuan hukuman pidana tersebut ditujukan untuk penjeraan dan pembelasan. Termasuk hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak merupakan untuk tujuan penjeraan dan pembelasan (Roringkon 2015: 69; Andi dan Sumangelipu 1985).

C. Kesimpulan

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu jaminan, sesuai dengan amanat UUD 1945, terhadap perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhadap perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Bagi Islam, politik adalah pengaturan urusan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan oleh negara dan rakyat yang berdasarkan kepada hukum Islam. Dengan pengertian yang lain, negara yang secara langsung melakukan pengaturan dimaksud secara

praktis, sedangkan rakyat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Negara dan rakyat, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, seperti Negara berkewajiban melindungi keamanan warga sedangkan mendapatkan keamanan tersebut merupakan hak bagi rakyat. Dalam konteks ini, hukuman kebiri dalam Perppu tersebut merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk mashlahah dalam hal perlindungan terhadap hak atas hidup, harta, dan kehormatan warga Negara khususnya bagi anak-anak perempuan. Selain itu, hukuman kebiri dalam Perppu tersebut sebagai upaya menegakkan keadilan komutatif, yaitu suatu keadilan yang memberikan kompensasi yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku oleh hakim.

D. Daftar Pustaka

- Abd al-Qâdir 'Audah. *al-'Islâm wa 'Audlâ'unâ al-Siyâsiyyah*. Cairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1951.
- Andi, Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan yang akan Datang*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Re- Ideologi Islam Membumikan Islam Sebagai Sistem*. Bogor: al-Azhar, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ibn Manzhûr. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Shâdir, t.t.
- Prataxis, Suprima Ollifica. Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5/Juni/2014: Hal. 51-60.

Roringkon, Ferlando. Kejahatan Homo Seksual Terhadap Anak
Dilihat dari Aspek Hukum Pidana. Lex Crimen Vol. IV/No.
8/ Okt/2015: Hal. 69-76.

Sumber Lain

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[www.ilmusiana.com/2016/05/hukum-kebiri-pelaku-
pemeriksaan.html](http://www.ilmusiana.com/2016/05/hukum-kebiri-pelaku-pemeriksaan.html). Diakses Tanggal 10 November
2016.

Jawa Pos. 22/10/2015

KEBIRI DALAM KAJIAN KOMNAS PEREMPUAN*

Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung

Abstrak

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan muncul gagasan Hukum Kebiri bagi Pelaku Perkosaan, di kalangan Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung) yang juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam pandangan Komnas Perempuan, hukuman kebirian dapat dikategorikan dalam bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Anti Penyiksaan) sejak tahun 1998, melalui UU No. 5 Tahun 1998. Seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menyikapi tingginya angka perkosaan serta semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual baik terhadap perempuan bahkan diikuti dengan tindak kekerasan lainnya, pemerintah seharusnya melakukan penanganan yang komprehensif, sistemik dan terpadu, meliputi: Pencegahan (merubah pandangan masyarakat, memodifikasi perilaku, dan melindungi kelompok rentan); Perlindungan (memastikan tersedianya layanan bagi korban dan tidak terulangnya kekerasan); Penuntutan dan Penyidikan (memastikan semua pelaku diajukan ke pengadilan untuk dikenai dakwaan & tuntutan); Penghukuman (memastikan setiap pelaku dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya); Pemulihan (termasuk memastikan restitusi dan kompensasi bagi korban). Banyaknya kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan yang terjadi pada akhir-akhir ini seharusnya dapat menjadi koreksi oleh negara untuk melihat kebijakan perlindungan yang selama ini tidak berjalan efektif. Negara dapat

memperkuat koordinasi antar institusi untuk pencegahan, penegakan hukum dan pemulihan korban, dan bukan justru melahirkan sanksi baru yang bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan dan rentan untuk diterapkan secara sewenang-wenang.

Kata Kunci : *Kebiri, KOMNAS Perempuan*

———* Disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah Tanggal 10 Agustus 2016

A. Pendahuluan

Saat ini sangatlah banyak kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat. Terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan seksual ini dipacu dari berbagai hal. Seperti beredarnya video porno yang terebar dimasyarakat luas, maupun film-film yang tidak layak bagi anak berusia dibawah 18 tahun, factor lingkungan, pergaulan, minum-minuman keras yang beralkohol dan lain sebagainya.

Tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang berakhir pembunuhan sekarang ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan ini terjadi bukan hanya kesalahan dari pelaku tindak kekerasan seksual saja, tetapi korban juga bisa menjadi pemicu dari tindakan pelaku kejahatan ini. Dijaman sekarang ini banyak sekali wanita yang tidak menjaga dirinya dengan baik. Mereka dengan mudahnya memancing kejahatan dengan menggunakan pakaian yang seksi dan tidak selayaknya dikenakan. Kekerasan seksual terjadi bukan hanya kepada orang dewasa saja, bahkan banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkupnya dekat dengan korban baik itu

lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut sebagai *pedophilia*. Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, akan tetapi, terjadi perkembangan di kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.²⁹ Karena anak-anak dibawah umur menjadi objek dari pelaku *pedophilia* maka tidak jarang anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang bahkan berujung dengan kematian.

Dalam mengatasi tindak kekerasan seksual ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A.³⁰ Pasal-pasal ini mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Dengan adanya hukuman kebiri ini diharapkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual ini kehilangan hasrat untuk kembali melakukan perbuatannya. Tetapi, wacana tersebut menimbulkan pro dan kontradiksi lingkungan masyarakat. Banyak yang mendukung keputusan kebiri ini, tetapi banyak pula yang

²⁹ Sawitri Suparti Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, h. 71.

³⁰ UUD 1945, Pasal 28B, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat 1.

menolaknyanya. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana pandangan hukuman kebiri berdasarkan syariah Islam?, Bagaimana hukuman kebiri ditinjau dari tujuan pemidanaan di Indoneisa?, Bagaimana hukuman kebiri Dalam Kajian KOMNAS Perempuan ?

B. Pembahasan

1. Pengertian Kebiri

Kebiri (*al ikhsha`*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.³¹

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu

- a. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan

³¹ Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, hlm. 150; *Al Mu'jamul Wasith*, 1/269; *Al Mausuw'ah Al Fiqhiyyah*, 19/119; 'Adil Mathrudi, *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahawaat*, h. 88.

sekaligus menjadi mandul permanen. (*Jawa Pos*, 22/10/2015).

- b. Metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi. *Pertama*, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon testosteron seolah-olah hilang. *Kedua*, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula. (*Jawa Pos*, 22/10/2015)

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.³²

Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun

³² *Ibid.*

penjara. Perpu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

2. Hukuman Kebiri Tidak Sesuai dengan Syariah Islam

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya haram, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut;

Pertama, syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan fuqaha.

Dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* dikutip pernyataan tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri sebagai berikut :

وقال ابن حجر : هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم

“Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata, '(Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.' (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/121).

Dalam kitab *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat*, Syekh 'Adil Mathrudi berkata :

أجمع العلماء على أن خصاء بني آدم محرم ولا يجوز

“Para ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.” ('Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat, hlm. 88).

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadits-hadits sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap kebiri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata :

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

"Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian." (HR Bukhari no 5073; Muslim no 3390).

Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata ;

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك

"Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu." (HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141). (Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam, hlm. 164; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/119)

syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum non syariah adalah firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS Al Ahzab [33]: 36).

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dari Syariah Islam. Maka dari itu haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sbb; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az-zina*), yaitu dirajam jika sudah *muhshan* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muhshan*; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir. (Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul 'Uqubat*, hlm. 93).

Memang benar, hukuman untuk pelaku pedofilia yang hanya melakukan pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*), adalah hukuman *ta'zir*, yang dapat ditentukan sendiri jenis dan kadarnya oleh hakim (*qadhi*). Misalnya dicambuk 5 kali cambukan, dipenjara selama 4 tahun, dsb. Pertanyaannya, bolehkah hakim menjadikan kebiri sebagai hukuman *ta'zir*?

Jawabannya, tidak boleh (haram). Sebab meski hukuman *ta'zir* dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman *ta'zir* itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik Al Qur'an maupun As Sunnah. Jika dilarang oleh nash syariah, haram dilaksanakan. Misalnya, hukuman membakar dengan api. Ini haram hukumnya, karena terdapat hadits sahih yang melarangnya (HR Bukhari) (Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul 'Uqubat*, hlm. 81). Maka demikian pula, menjatuhkan *ta'zir* berupa kebiri hukumnya haram, karena telah terdapat hadits-hadits sahih yang melarang kebiri.

Ketiga, dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Dalil keharamannya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas RA bahwa :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال
بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

"Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki." (HR Bukhari, no 5546).

Hadis ini mengharamkan perbuatan laki-laki menyerupai wanita atau perbuatan wanita menyerupai laki-laki. Maka, metode kebiri dengan cara injeksi hormon estrogen kepada laki-laki pelaku pedofilia haram hukumnya, karena menjadi perantaraan (*wasilah*) bagi laki-laki itu untuk menyerupai lawan jenisnya (perempuan). Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan:

الوسيلة إلى الحرام محرمة

"Al-Wasilah ila al-haram muharromah." (Segala perantaraan menuju yang haram hukumnya haram juga).

Berdasarkan 3 (tiga) alasan di atas, menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya adalah haram.

3. Hukuman Kebiri ditinjau dari Sistem Pidanaan di Indonesia

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan),

relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud,tujuan) dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).³³ Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan pendapat P.A.F . Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian.

Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa

³³ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor

tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menyasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

4. Hukuman Kebiri Tidak Sesuai dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia.. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Menurut Tina Asmarawati, terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu dapat menimbulkan si penderita melakukan kejahatan, antara lain sakit jiwa, *psycho-pathologi* tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia* dan fetishisme.³⁴ Ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan apabila pelaku suatu tindak pidana jiwanya cacat maka ia tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Banyak penelitian menyatakan hanya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penderita dan disebabkan *pedophilia*, sisanya disebabkan

penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban kekerasan dalam keluarga.³⁵ Jadi pemerintah harus menyortir para pelaku kekerasan seksual pada anak apakah ia memiliki penyakit *pedophilia* atau tidak. Pelaku yang memiliki penyakit *pedophilia* selain dijatuhi pidana yang sesuai juga diberikan rehabilitasi atau pengobatan atas penyakitnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua, hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

5. Hukuman Kebiri Dalam Kajian KOMNAS Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23

³⁴Tina Asmarawati, 2013, *Hukum & Psikiatri*, Yogyakarta, Deepublish, h. 108.

³⁵Alan Zarembo, 2013, *Many Research Taking a Different View of Pedophilia*, Los Angeles Times, diakses melalui articles.latimes.com/2013/jan/14/local/la-me-pedophiles-2013115

Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, atau yang disebut Perppu tentang Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan, seperti dinyatakan dalam rilis yang diterima di Jakarta pada Kamis (26/5), menyayangkannya, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 Tahun 1998, yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan.

Hukuman mati dan hukuman kebiri, termasuk dalam bentuk hukuman ini. Pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu, pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Sementara sejauh ini, tidak banyak kasus kekerasan seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapatkan sanksi hukum maksimal. Komnas Perempuan mengkhawatirkan pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini, hanya semata-mata untuk merespons desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penerbitan Perppu ini, justru menunjukkan cara pandang negara terhadap persoalan kekerasan seksual yang sudah lama terjadi, hanya sebagai persoalan penjeraan pelaku semata. Faktor lain, seperti aspek yang menjadi penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan

yang prima terhadap korban dan pemulihan, tidak mendapat perhatian.

Dalam pandangan Komnas Perempuan, yang dibutuhkan untuk menjerakan pelaku kekerasan seksual saat ini adalah penegakan hukum yang serius, bebas mafia dengan memastikan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku, sebagaimana yang telah diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan kerap terjadi.

Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa, bisa berlangsung dalam waktu cepat dengan mengoptimalkan penerapan hukum yang sudah ada (termasuk hukuman seumur hidup) kepada pelaku. Pada saat yang bersamaan, memastikan seluruh kebijakan yang telah ada, untuk pemulihan korban dapat berjalan dalam waktu yang cepat, tepat dan mudah, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

Perppu Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak yang baru saja diubah pada tahun 2015, menunjukkan sikap reaktif dan parsial pemerintah terhadap penanganan kejahatan seksual, yang seharusnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur. Pemerintah terkesan baru menyadari pentingnya

penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual, padahal kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan telah lama terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Komnas Perempuan sudah menyampaikan, setiap 2 jam, ada 3 perempuan (termasuk anak perempuan) menjadi korban kejahatan seksual sejak tahun 2013. Bahkan Presiden RI sudah mencanangkan Darurat Kekerasan Seksual Anak sejak tahun 2014. Sayangnya data ini tidak menjadi pertimbangan ketika Perubahan UU Perlindungan Anak dilakukan pada tahun 2015, sehingga harus dilakukan perubahan lagi pada tahun 2016 melalui Perppu.

Komnas Perempuan, keberatan terhadap perbedaan respons atas kekerasan seksual terhadap anak dengan respons terhadap perempuan, yang memberi kesan satu tidak lebih penting dari lainnya. Padahal kerentanan perempuan terhadap perkosaan, sama dengan kerentanan anak, dan dampak perkosaan terhadap perempuan tidak kalah buruknya dengan dampak perkosaan terhadap anak, karena masih ada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, yang menimpa perempuan Indonesia, dewasa maupun anak.

Di dalam program aksi komitmen kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala pada saat pertama kali dilantik menjadi presiden, terdapat pernyataan yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual, yaitu bagaimana mengefektifkan pelaksanaan semua undang-undang, untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan,

meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif, termasuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Seharusnya penanganan yang luar biasa untuk kejahatan luar biasa dapat diletakkan dalam kerangka ini.

Untuk itu Komnas Perempuan berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menimbang kembali pemberlakuan Perppu tersebut, berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dan mensegerakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai payung hukum yang akan melindungi perempuan dan anak Indonesia dari Kekerasan Seksual serta memberikan keadilan bagi korban, untuk itu KOMNAS Perempuan mendukung mendorong :

- a. Pemerintah dan Parlemen memastikan tersedianya regulasi yang dapat melindungi perempuan dan anak dari seluruh jenis kekerasan seksual, termasuk dalam hal ini memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar Prolegnas Tambahan 2015 – 2019, sebagai *lex specialist* untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual yang ada saat ini memiliki banyak keterbatasan dan tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan korban;

- b. Aparat Penegak Hukum menerapkan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku perkosaan, dan menjamin tidak adanya upaya mediasi dalam penyelesaian kasus-kasus perkosaan, terutama perkosaan terhadap anak;
- c. Para Pemuka Masyarakat meningkatkan upaya sosialisasi/pendidikan kesetaraan gender kepada masyarakat baik di dalam keluarga maupun komunitas dengan menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi perempuan.
- d. Pemerintah Daerah memperkuat mekanisme/inisiatif lokal terkait pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencermati perkembangan berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman pengebirian. Mengikuti pemberitaan di media massa, rencana tersebut akan diwujudkan melalui penerbitan peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) yaitu dengan memberikan penghukuman kebiri secara kimiawi (chemical castration). Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan

diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia. Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut:

- 1). Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “[s]etiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.³⁶ Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 2). Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (the right to informed consent) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (the protection of the physical and mental integrity of the person).
- 3). Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- 4). Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual

terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya para pengambil kebijakan demi pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

C. Penutup

Dari Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Syariat Islam menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya haram
2. Tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua, hukuman kebiri tidak sesuai

dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

3. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini. Pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespons desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum & Psikiatri*, Deepublish, Yogyakarta. Kartanegara,
- Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sadarjoen, Sawitri Suparti, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*,
Penerbit Universitas Indonesia Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi
Manusia

HUKUM KEBIRI DALAM PERSPEKTIF MAQASIDUSY SYARI'AH*

H. Mohammad Rusfi

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Semakin hari Indonesia semakin terancam, tindak kejahatan kian merajalela. Salah satu kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian adalah kasus pelecehan seksual yang semakin menjamur dan sulit dikendalikan. Pelecehan seksual bukan hanya dilakukan kepada perempuan dewasa saja melainkan kepada anak-anak.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar seorang laki-laki yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang berumur 2,5 tahun. Peristiwa ini membuat miris karena pelaku sudah tidak pandang bulu, mereka tega melakukan perbuatan keji tersebut kepada anak kecil demi memuaskan hawa nafsunya, dan hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua karena kemungkinan pelaku seksual akan senantiasa berkeliaran untuk mencari korbannya, sehingga anak-anakpun akan terancam.

Pemerintah seakan tak mampu mengatasinya, hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual yang telah diundangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih menuai kontroversi dan belum ada

titik temu. Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel menyatakan, bahwa hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera.³⁷

Menurutnya, ada kekeliruan asumsi yang melatarbelakangi rencana tersebut. Hasrat seksual muncul bukan hanya karena faktor hormonal, tetapi juga fantasi. “Predator yang sudah lumpuh bisa memakai cara non-persetubuhan dan mendorong orang lain untuk menyalurkannya, katanya. (dalam viva.co.id). Sementara itu berbeda dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang mendukung hukuman kebiri bagi pelaku seksual. Ia beranggapan bahwa tujuan utamanya adalah demi efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal serupa.

Pro kontra mengenai hukuman kebiri ini mengakibatkan pemerintah bertindak lambat dalam mengambil keputusan. Hingga saat ini nampaknya pemerintah hanya setengah hati dalam menangani kekerasan seksual, karena pemerintah tidak melakukan usaha untuk menutup pintu pemicu kekerasan seksual yakni pornografi, minuman keras, dan narkoba.

Meskipun terkesan lambat, namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

* Disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah Tanggal 10 Agustus 2016

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimia (kimiawi) serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Menanggapi berlakunya hukum kebiri bagi kejahatan seksual terhadap anak tersebut, timbul pertanyaan; Apakah *maqasidusyari'ah* dapat tercapai dengan memberlakukan hukum kebiri tersebut ?

B. Pembahasan

1. Pengertian hukum kebiri

Kebiri (*al ikhsha`*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. (*Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, hlm. 150; *Al Mu'jamul Wasith*, 1/269; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 19/119; 'Adil Mathrudi, *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahawaat*, hlm. 88).

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik

³⁷ (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-

dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul permanen. (*Jawa Pos*, 22/10/2015).

Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon testosteron seolah-olah hilang. Kedua, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa **Kebiri** (disebut juga **pengebirian** atau **kastrasi**) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Hukum kebiri memiliki

pengertian secara harfiah *sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan*; ini artinya, para pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah hilang fungsi seksualnya. Baik dia laki laki maupun perempuan, maka laki laki atau perempuan tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenis.³⁹

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah.⁴⁰ Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri orang kasim biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumahtangga istana: khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik,

³⁸ Jawa Pos, 22/10/2015.

³⁹ <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>; Jum'at 5-8-2016

⁴⁰ "On Target". *On Target (newsletter)*. Target Health, Inc. 2003-07-27. Diakses tanggal 2007-04-30. Section II: HISTORY OF MEDICINE)

sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan.

Dalam sejarah Tiongkok, orang kasim atau disebut sida-sida diketahui memegang kekuasaan yang cukup besar di istana, terkadang merebut kekuasaan dari kaisar yang sah, seperti disebutkan dalam sejarah dinasti Han, dan masa menjelang akhir dinasti Ming. Peristiwa yang sama juga dilaporkan terjadi di Timur Tengah.

Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati. Pemotongan hanya testisnya saja mengurangi risiko kematian.

Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau pengebirian secara kimia secara medis mungkin dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat.⁴¹ Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan hormon testosteron -baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker. Hilangnya testis yang berarti hilangnya pula hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual. Kaum transseksual laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur orchiectomi,

⁴¹ <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>

penghilangan alat kelami laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.⁴²

2. Cara kerja pelaksanaan hukum kebiri

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur soal hukuman tambahan berupa kebiri segera disahkan menjadi UU. Hal ini disampaikan Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko, dalam rapat pembahasan Perppu tersebut di Komisi VIII DPR, Senin (25/7). Menurutnya, penerapan hukuman kebiri sudah dibahas secara mendalam di internal pemerintah.

Dalam praktiknya, ujar Sujatmiko, hukuman kebiri berupa suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Ini akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik, hukuman ini akan disertai rehabilitasi apalagi pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, kelebihan hormon testosteron. (Hukuman kebiri) bukan memotong tapi melemahkan libidonya, katanya dalam rapat tersebut. Kemudian, alat deteksi akan dipasang setelah pelaku keluar penjara. Namun, bentuk alat dan teknologinya masih akan dipelajari lebih lanjut.

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri#cite_ref-1

Bila pelaku mendapat vonis hukuman pokok selama 15 tahun penjara, maka hukuman tambahan berupa kebiri suntik kimia serta pemasangan alat deteksi baru dilakukan setelah itu. Akan ada publikasi identitas pelaku, memastikan predator ini mendapatkan hukuman dari masyarakat. Perlu digarisbawahi semua hukuman itu tidak berlaku kalau dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana teknisnya, semuanya akan kita rancang," jelas Sujatmiko.

Hasil dialog pemerintah dengan banyak kalangan, ujar Sujatmiko, semua menyatakan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu dihukum seberat-beratnya. Termasuk IDI, meskipun para dokter keberatan menjadi eksekutor hukuman suntik kebiri karena berlawanan dengan etika dokter. Yang paling urgent Perppu ini bisa segera diundangkan. Intinya kami yakin, kawan-kawan dokter melihat ini ada urgensi untuk segera diundangkan. Perrpu ini keputusan politis presiden, dan bolanya ada di bapak-bapak (dewan), sudah banyak korban, pungkasnya.

Dari penjelasan Deputy bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa cara kerja kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dirancang pemerintah itu adalah sbb;

- a. Hukuman kebiri berupa suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Bila pelaku mendapat vonis hukuman pokok selama 15 tahun penjara,

maka hukuman tambahan berupa kebiri suntik kimia serta pemasangan alat deteksi baru dilakukan setelah itu.

- b. Suntikan kimia terhadap pelaku akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik.
- c. Hukuman kebiri bukan memotong tapi melemahkan libidonya.
- d. Pelaku akan diberikan rehabilitasi
- e. Setelah pelaku keluar dari penjara maka kepadanya akan dipasang alat deteksi, guna untuk mendeteksi gerak gerik pelaku selanjutnya.
- f. Identitas pelaku akan di publikasikan agar predator ini mendapatkan hukuman dari masyarakat.
- g. Semua hukuman itu tidak berlaku kalau kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh anak-anak.

3. Resiko yang timbul bagi orang yang dikebiri

Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik. Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin." kata Wimpie kepada *Kompas.com*. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh.

Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Dokter spesialis neurologi, Roslan Yusni Hasan, menjelaskan bahwa kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang. Caranya dengan menyuntikkan hormon. Ada banyak jenis bahan kimia yang bisa dipakai. Namun, kata dia, hormon yang banyak tersedia dan pada umumnya digunakan adalah Depo-Provera. "Depo-Provera adalah obat KB (keluarga berencana) yang sudah biasa dipakai perempuan, tapi digunakan laki-laki untuk menurunkan libido," kata Roslan, yang biasa disapa Ryu Hasan, saat dihubungi *Tempo*, Jumat, 27 Mei 2016.

Cara menyuntikkannya pun sama dengan suntik KB. Misalnya, di bagian lengan, paha, dan bokong. Dampaknya pun sama dengan KB, bergantung pada pemakaian. "Pengaruhnya ada yang enam bulan, dua bulan,". Obatnya bekerja tak sampai seumur hidup. Efek pemberian suntikan kebiri, menurut Roslan Yusni Hasan (Ryu Hasan), adalah membuat hormon seseorang tidak normal. "Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Semua terganggu,".

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan testosteron. "Kalau itu pertimbangannya kesehatan. Kalau (hukuman kebiri) ini kan pertimbangannya bukan kesehatan, tapi hukuman." Menurut Ryu, kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Sebab,

orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal,". Suntikan kebiri kimia tak lantas membuat seseorang tak melakukan pemerkosaan lagi. Juga tidak membuat pria jadi kemayu.⁴³

Dari penjelasan singkat seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa resiko yang timbul dari orang yang terkena hukuman kebiri itu adalah;

- a. Hilang gairah seksualnya.
- b. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.
- c. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
- d. Akan terjadi penuaan dini.
- e. Suntikan kebiri membuat hormon seseorang tidak normal. Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Semua terganggu.

4. Apakah maqasidusysyari'ah dapat tercapai dengan memberlakukan hukum kebiri tersebut

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.

⁴³ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774519/hukuman-kebiri-kimia->

Sebagai pedoman hidup, syari'at Islam memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁴⁴ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan⁴⁵.

Di dalam Alqur'an Allah menyebutkan beberapa kata "*syari'ah*" diantaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. QS. Al-Jatsiyah: 18.

begini-cara-kerja-dan-dampaknya

⁴⁴ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt, hal. 3642.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997., hal. 712

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. QS. Asy-Syuura: 13.

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syathibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
والدنيا معا

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.

Pada bagian lainnya beliau menyebutkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.

Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘*illat* atau motif (*al-ba’its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat (*‘aqibah*) dari penerapan syariat.

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat* (*al-‘illiyah*), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (*maslahat*) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah ta’ala:

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. QS. Al-Isra: 82.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiyaa: 107.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat *ta' lil* (bentuk kata yang menunjukkan '*illat*'), misalnya dengan adanya *lam ta' lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (*al-natijah*) diutusnya Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (*maslahat*) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan '*illat*' dari penetapan syariat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *Maqashid Syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Beberapa Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفالة
ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم

Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniat* mereka.

Kesimpulannya bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

5. Tujuan ditetapkannya hukum Islam

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta'ala: QS. Al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam..

Dalam ayat yang lainnya Allah ta'ala berfirman: ” QS. Al-Baqarah: 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Ayat 201 surat Al-Baqarah dan seterusnya di atas memuji orang yang berdoa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin. Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- e. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamshah atau al-maqasid al- shari'ah.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak. Dengan demikian pembentukan hukum yang dilakukan oleh manusia harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sesuatu ketentuan yang telah mempunyai ketetapan dari Allah dan Rasul, manusia hanya dapat melaksanakan dan tidak punya kewenangan untuk merobahnya, sebab manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Sebagai khalifah tentu tidak pantas ada pilihan lain bagi manusia apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Firman Allah;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata,” (QS Al Ahzab [33]: 36).

Untuk memahami lebih jauh tentang maqasidul khamsah sebagai tujuan pembentukan hukum dalam Islam yang tersebut diatas tadi, dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang

dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy-Syura': 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

b. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

إِلَيْهِ يَا حَسَنٌ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

c. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah S ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah ta'ala

melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah ta'ala selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخٰبًا بِهٖ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

d. Memelihara Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Q.S An-Nisa: 3-4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

e. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا شُهِوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا^١ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^٢ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^٣ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Memperhatikan tujuan disyari'atkannya hukum itu adalah untuk menjaga kesucian dan keutuhan ketetapan Allah tentang agama, keturunan, jiwa, harta dan akal. Suatu ketentuan hukum haruslah tertuju kepadanya, murtad dihukum untuk menjaga agama, khamar diharamkan untuk menjaga akal, pencuri potong tangan untuk menjaga harta, zina diharamkan untuk menjaga keturunan. Jadi suatu hukum diberlakukan untuk menjaga kesucian dan keutuhan ketentuan Allah.

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan haruslah membuat jera bagi pelaku kejahatan dan juga untuk memberi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa sehingga pelaksanaan hukuman itu diketahui oleh orang lain agar orang lainpun merasa takut untuk melakukan perbuatan serupa. Kita lihat saja misalnya potong tangan bagi pencuri, yang bersangkutan kehilangan tangannya, dan buktinyapun terlihat oleh orang lain sehingga orang lain pun merasa takut untuk berbuat. Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum itu sejalan atau tidak dengan *maqashidusysyari'ah*, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Mempertimbangkan antara Maqashid Syariah dan Detail-Detail Nash

Yang menjadikan keharusan di sini adalah mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama pentingnya, yaitu memelihara *maqashid* “tujuan” syariah yang menyeluruh (*kulli*) dan memelihara nushush yang parsial (*juz'i*)⁴⁶.

Kesimpulannya adalah bahwa tujuan syariat itu untuk mencapai kebaikan, maslahat bagi manusia, dan menghindari bahaya dan kerusakan mereka. Inilah yang menjadi pusat kajian Imam asy-Syatibi dalam kitab *muwafaqat* yang menjadikan ilmu dan pemahaman merupakan sebab ijtihat bukan hanya sekadar syarat. Ini pula yang dilakukan oleh para sahabat

terutama *Khulafaur-Rasyidin*, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan lainnya. Mereka tidak mengesampingkan tujuan dalam fiqih dan fatwa mereka⁴⁷.

Berkaitan dengan hukum kebiri tentu untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun dalam memberikan hukuman bagi sesuatu kasus haruslah terlebih dahulu merujuk kepada ketentuan nash al-Quran maupun Hadits. Sejauh ini hukum kebiri tidak dikenal dalam literatur jinayah, karena hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (zina) telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran. Ada dua model hukuman bagi pelaku zina;

1). Pezina al-Muhshân

Pezina yang pernah menikah (al-Muhshân) dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan al-Qur'an, hadits mutawatir dan ijma' kaum muslimin.⁴⁸ Ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam dalam al-Qur'an meski telah dihapus lafadznya namun hukumnya masih tetap diberlakukan. Umar bin Khatthab Radhiyallahu 'anh menjelaskan dalam khuthbahnya :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ الْقُرْآنَ وَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا
وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا

⁴⁶ Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.80.

⁴⁸ Lihat Tashîlul-Ilmâm Bi Fiqhi Lil Ahâdîts Min Bulûgh al-Marâm, Shalih al-fauzân 5/230

بَعْدَهُ وَ أَخْشَىٰ إِنَّ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولُوا : لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

*“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur`an kepada NabiNya dan diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat Rajam. Kami telah membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaksanakan hukuman rajam dan kamipun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan: “Kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah!” sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh (hukuman) rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah (al-Muhshân), bila telah terbukti dengan pesaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri”.*⁴⁹

Ini adalah persaksian khalifah Umar bin al-Khatthâb Radhiyallahu ‘anhu diatas mimbar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dihadiri para sahabat sementara itu tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.⁵⁰ Sedangkan lafadz ayat rajam tersebut diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Mâjah berbunyi :

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

⁴⁹ HR al-Bukhâri dalam kitab al-Hudûd, Bab al-I’tirâf biz-Zinâ 1829 dan Muslim dalam kitab al-Hudûd no. 1691.

⁵⁰ Dari pernyataan Syeikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhu al-Mumti’ 14/229.

“Syaiikh lelaki dan perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁵¹

Sedangkan dasar hukuman rajam yang berasal dari sunnah, maka ada riwayat mutawatir dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam baik perkataan maupun perbuatan yang menerangkan bahwa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah merajam pezina yang al-Muhshân (ats-Tsaib al-Zâni).⁵²

Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan: Para ulama telah berijma’ (sepakat) bahwa orang yang dihukum rajam, terus menerus dilempari batu sampai mati.⁵³ Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan: Kewajiban merajam pezina al-muhshân baik lelaki atau perempuan adalah pendapat seluruh para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama-ulama setelah mereka diseluruh negeri islam dan kami tidak mengetahui ada khilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama) kecuali kaum Khawarij.⁵⁴

Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshân (yang sudah menikah dengan sah) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga kehormatannya dari kemaluan yang haram dan dia tidak butuh dengan kemaluan yang

⁵¹ HR Ibnu Mâjah kitab al-Hudûd Bab ar-Rajmu dan dishahihkan al-Albâni dalam Shahîh Sunan Ibnu Mâjah 2/81

⁵² Tas-hîlul-Ilmâm bi Fiqhi Lil Ahâdîts Min Bulûgh al-Marâm, Syaikh Shâlih al-Fauzân 5/230.

⁵³ Dinukil dari al-Mughni 12/310.

⁵⁴ Al-Mughni 12/309..

diharamkan itu. Juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman hukuman zina. Dengan demikian, udzurnya (alasan yang sesuai syara') terbantahkan dari semua sisi. dan dia telah mendapatkan kenikmatan sempurna. Orang yang telah mendapatkan kenikmatan sempurna (lalu masih berbuat kriminal) maka kejahatannya (jinayahnya) lebih keji, sehingga ia berhak mendapatkan tambahan siksaan.⁵⁵

2). **Pezina Yang Tidak al-Muhshân**

Pelaku perbuatan zina yang belum memenuhi kriteria al-muhshân, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk)”. [An-Nûr/24:2]

Al-Wazîr rahimahullah menyatakan : “Para ulama sepakat bahwa pasangan yang belum al-muhshân dan merdeka (bukan budak), apabila mereka berzina maka keduanya dicambuk (dera), masing-masing seratus kali.

Hukuman mati (dengan dirajam) diringankan buat mereka menjadi hukuman cambuk karena ada udzur (alasan syar'i) sehingga darahnya masih dijaga. Mereka dibuat jera dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan cambukan. Kemudian

⁵⁵ Cuplikan dari al-Mulakhas al-Fiqhi 2/529.

ditambah dengan diasingkan selama setahun menurut pendapat yang rajah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ.

“Ambillah dariku! ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan, yang belum al-muhshaan dikenakan seratus dera dan diasingkan setahun.” [HR Muslim].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan :
“Apabila tidak muhshân , maka dicambuk seratus kali, berdasarkan al-Qur`an dan diasingkan setahun dengan dasar sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”⁵⁶

3). Kekhususan hukuman pezina

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan tiga karakteristik khusus bagii hukuman zina :

- a). Hukuman yang keras, yaitu rajam untuk al-Muhshân dan itu adalah hukuman mati yang paling mengenaskan dan sakitnya menyeluruh keseluruhan badan. Juga cambukan bagi yang belum al-muhshân merupakan siksaan terhadap seluruh badan ditambah dengan pengasingan yang merupakan siksaan batin.
- b). Manusia dilarang merasa tidak tega dan kasihan terhadap pezina
- c). Allah memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dihadiri sekelompok kaum mukminin. Ini demi kemaslahatan

⁵⁶ Lihat penjelasan para ulama tentang hal ini dalam al-Mughni 12/314-318.

hukuman dan lebih membuat jera serta sebagai pelajaran bagi yang lainnya.

Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmanNya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” [an-Nûr/24:2]

Dengan demikian memberikan hukuman bagi suatu kejahatan haruslah mempertimbangkan antara maqashid syari'ah dengan dalil-dalil nash. Artinya sesuatu tindak kejahatan yang sudah ada hukumannya dalam nash tentu harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan nash tersebut. Hukum kebiri tidak terdapat dalam nash karena memang kebiri untuk manusia dilarang dalam Islam.

Dalam kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah dikutip pernyataan tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri sebagai berikut :

وقال ابن حجر : هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم

“Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata, '(Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.”⁵⁷

⁵⁷ Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/121

Dalam kitab Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat, Syekh 'Adil Mathrudi berkata :

أجمع العلماء على أن خصاء بني آدم محرم ولا يجوز⁵⁸

"Para ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh."

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadits-hadits sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap kebiri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata :

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له
لاختصينا

"Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian,"⁵⁹

Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata ;

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا
نختصي؟ فنهانا عن ذلك

"Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu."⁶⁰

88 ⁵⁸ 'Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat, hlm.

⁵⁹ HR Bukhari no 5073; Muslim no 3390

⁶⁰HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141). (Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam, hlm. 164; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/119

Dari keterangan tersebut jelas bahwa kebiri dilarang untuk menusia. Ada sebahagian orang berpendapat bahwa yang dilarang itu kalau dilakukan oleh perorangan tapi kalau sudah ditetapkan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah sebagai hukuman atas suatu kejahatan maka kebiri dibolehkan. Pertanyaannya; apakah sesuatu yang dilarang Allah itu menjadi halal apabila sudah diligalkan oleh pemerintah ? kalau demikian halnya berarti zina yang dilarang oleh nash tentu menjadi halal bila sudah dilegalkan oleh penguasa (pemerintah). Ini adalah pendapat yang mencerminkan inkosistensi dalam beragama, sehingga bukannya menegakkan agama Islam tetapi justru menghancurkan agama itu sendiri, karena seolah-olah ketetapan Allah bisa dirobah melalui ketetapan pemerintah. Na'uzubillah.

b. Kategori Hukum (Maqashid asy Syari'ah)

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

- 1). Daruriyyat; Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak

terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁶¹

- 2). Hajiyyat; Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶²
- 3). Tahsiniyyat; Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.⁶³

Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual apalagi terhadap anak sudah termasuk kebutuhan yang mendesak (*daruriyat*) mengingat kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin merajalela sehingga mencemaskan para orang tua akan keselamatan anak-anaknya. Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan setelah menjalankan hukuman pokok terasa masih terlalu ringan dan karenanya tidak akan memberi efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Apalagi pelaksanaan hukuman kebiri itu

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003, hlm.397.

⁶² Yusuf al-Qadharawi., hlm.79.

⁶³ Ibid., hlm.80.

dengan menggunakan suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Ini akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik, hukuman ini akan disertai rehabilitasi apalagi pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, kelebihan hormon testosterone.

Disamping itu selain diberikan rehabilitasi bagi yang sudah mendapat hukuman kebiri itu akan juga dipasang alat deteksi untuk mengetahui gerakgerik pelaku tersebut. Disini terkesan pemerintah tidak serius memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Kita bisa bayangkan kalau terjadi ada sampai ratusan ribu pelaku kejahatan seksual itu nanti berapa banyak obat yang harus dibeli, berapa banyak petugas yang harus digaji, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli alat deteksi tersebut, berapa banyak petuga pengintai yang harus digaji oleh negara. Kalau begini caranya nampaknya bukan memberikan hukuman tetapi terkesan melakukan observasi, coba-coba, tidak serius, atau setengah hati. Biaya banyak keluar hasilnya tidak signifakan untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak tersebut

Kalau saja kita mau memperhatikan hukum zina yang tetapkan oleh syarak; hukum rajam bagi pelaku muhshon, dan hukum cambuk ditambah pengasingan selama sau tahun bagi yang bukan muhson, sudah cukup berat. Itu dilakukan oleh orng yang berzina yang notabenanya suka-sama suka. Apalagi kalau dilakukukan dengan kekerasan bahkan sampai mati, terhadap

anak di bawah umur lagi, mestinya hukuman lebih berat lagi bukan hanya kebiri dengan cara suntikan kimia. Oleh karena itu hukum kebiri yang telah ditetapkan perintah terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut tidak sejalan dengan maqsidhusyariah.

c. Unsur-Unsur yang Membentuk Maqashid Asy Syari'ah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang luas.⁶⁴ Dalam sub kategori yang pertama, Syatibi membahas maksud Tuhan yang sebenarnya dalam menetapkan hukum, dalam hal ini untuk melindungi kemaslahatan manusia (baik yang berkenaan dengan duniawi maupun agama). Sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Dalam sub kategori yang kedua, Syatibi membicarakan tentang maksud Tuhan membuat syariat. Dengan demikian syariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh kalangan tertentu saja. Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah, karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka berarti mengabaikan hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam menurunkan hukumnya menghendaki agar umat Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.

Begitulah semestinya pelanggaran atas hukum secara sengaja dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa ada perbuatan yang praktiknya melanggar hukum padahal niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Syatibi sejauh ini dijelaskan dengan menjadikan sufi sebagai contoh. Namun disini dia melanjutkan diskusi tentang siasat hukum (*biyal*) dalam hubungan yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Dan dijelaskan pula bahwa sasarannya kali ini berpindah dari kaum sufi kepada kelompok ahli fiqih yang dianggapnya telah bertindak berlebihan dalam menyepelekan hukum, barangkali dalam menyampaikan kritiknya pada para ahli fiqih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan utama *biyal* adalah untuk mencegah berlakunya suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.⁶⁵

Dalam hal kejahatan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir ini terdapat beberapa unsur kejahatan yang berbeda yaitu zina dan pembunuhan apabila korban sampai mati, dan atau penganiayaan apabila dilakukan oleh beberapa orang laki-laki. Disini sudah jelas ada hukuman bagi pelaku zina, dan ada hukuman bagi pembunuhan atau penganiayaan. Jadi seharusnya bukan hukuman tambahan dari hukuman pokok, tetapi hukuman

⁶⁴ Wael b Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm.267.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.268.

bagi kejahatan zina dan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

d. Norma-Norma Hukum Maqashid asy Syari'ah

Pembahasannya pada perbuatan – perbuatan yang berkategori mubah, yang baik dilakukan ataupun tidak sama – sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan – perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing – masing terbagi lagi menjadi dua sub – kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram. Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

- 1). Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.
- 2). Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dala skala luas dapat menjadi wajib.
- 3). Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh.
- 4). Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.

Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan – perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.

Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain yaitu mandub dan makruh dan memperkenalkan penyimpangan dan toleransi dalam hukum. Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai ‘afw, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Sebuah sejarah yang bermula dari hadis nabi ‘afw : “orang yang paling bersalah adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak dilarang, kemudian menjadi dilarang setelah dinyatakan status hukumnya”. (*Ibid.*, hlm.260.)

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka

perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa. Dalam masalah – masalah dimana norma hukum telah ditetapkan, ‘afw berarti menjadikan dosa, apapun masalahnya selama ada alasan yang kuat untuk itu. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa.

Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan ‘azima dan rukhsa. Diperbolehkannya menggunakan rukhsa karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi – kondisi yang tidak memungkinkan.

C. Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sbb;

1. Hukum kebiri tidak sesuai dengan hukum Islam, dan penerapannya termasuk dosa besar, sebab ketentuan hukum bagi para pelaku zina telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran. Sesuatu yang sudah ada nashnya secara qoth’iy tidak ada pilihan lain selain menjalankannya. *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan*

yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada lagi pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, dengan sesat yang nyata,” (QS Al Ahzab [33]: 36).

2. Hukum kebiri tidak menyentuh tujuan hukum syari'at terutama dalam hal kemaslahatan ummat, karena hukum yang diberikan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan tidak nampak oleh orang lain sehingga orang lain tidak dapat mengetahuinya apakah yang bersangkutan telah menjalankan hukum kebiri atau tidak. Apalagi dengan cara injeksi obat tertentu hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas (tidak permanen) bahkan masih dimungkinkan untuk dipulihkan kembali dengan suntikan obat lain.
3. Dengan menambahkan alat deteksi bagi yang sudah dijatuhi hukum kebiri justru akan menambah kesulitan bagi pemerintah karena akan dipantau setiap saat, hal ini tentu menambah pengeluaran negara yang semestinya tidak perlu terjadi.

D. Daftar Pustaka

‘Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’alliqah bi Al Syahwat

Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 19/119-120;

<http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>

<http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>; Jum'at 5-8-2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri#cite_ref-1

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya>

Imam Al Qurthubi (Al Jami' li Ahkam Al Qur'an, 5/334),

Imam Badruddin Al 'Aini ('Umdatul Qari, 20/72),

Imam Ibnu Hajar Al Asqalani (Fathul Bari, 9/111)

Imam Shan'ani, (Subulus Salam, 3/110).

Kamaluddin Jumu'ah Bakar, Masa'il wa Ahkam Yamussu
Jasadal Insan

KH. M. Shiddiq Al-Jawi, Aktivis DPC HTI Kraton, Yogyakarta
& Dosen STEI Hamfara Yogyakarta

"On Target". On Target (newsletter). Target Health, Inc. 2003-07-27. Diakses tanggal 2007-04-30. Section II: HISTORY OF MEDICINE

Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha, Al Mu'jamul Wasith, 1/269; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/119; 'Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahawaat.

Surat Kabar harian; Jawa Pos, 22/10/2015.

HUKUMAN KEBIRI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

(Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif)*

Zuhraeni

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran terhadap anak. dan 58 persen merupakan kejahatan seksual. Dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 telah tercatat puluhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Beberapa kasus yang banyak menyita perhatian masyarakat antara lain; kejahatan seksual yang berujung pembunuhan dilakukan oleh 14 orang pemuda terhadap seorang anak SMP yang bernama Yuyun di Bengkulu. Siv, gadis Manado, diperkosa oleh 19 pria, yang menyebabkan hilang ingatan, Ibu rumah tangga di Karawang, diperkosa 5 orang pria didepan suaminya, pada tanggal 9 Mei 2016, Siswi SD berusia 12 tahun di kampung Cakung Bekasi, Siswa SMK yang diperkosa 3 pria hingga tewas, Kasus Eno Cangkul yang diperkosa oleh 3 orang.⁶⁶ Kasus

* Disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah Tanggal 10 Agustus 2016

⁶⁶ <https://id.scribd.com/doc/316864617/kebiri-makalah>, d akses pada hari Senin, 8 Agustus , 2016

—kasus tersebut adalah merupakan potret kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kasus pelecehan seksual dan pembunuhan, tentunya sangat menyita pikiran seluruh masyarakat Indonesia serta pemerintah. Menurut Presiden kejahatan seksual terhadap anak sebagai **Kejahatan Luar Biasa**.

Melihat maraknya beberapa kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggagas perlunya bentuk hukuman baru yaitu hukuman kebiri untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri dipandang dapat mencegah dan menurunkan kejahatan seksual terhadap anak yang saat ini jumlahnya makin meninggi. Hukum kebiri merupakan reaksi banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. hal ini dikarenakan pidana penjara tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Hukuman penjara dan denda yang diberikan oleh UU tentang Perlindungan Anak tidaklah cukup dan harus ada hukuman lainnya yang lebih berat yaitu hukuman kebiri.

Desakan dari berbagai pihak untuk segera menggantikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan seksual akhirnya Presiden Jokowi menandatangani Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya telah diganti melalui UU nomor 35 tahun 2014. Perppu nomor 1 tahun

2016, ditandatangani tgl 25 Mei 2016. Salah satu isi Perppu tersebut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual bagi anak Pasal 81 A ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Karena penetapan hukuman kebiri dianggap hukuman model baru untuk pelaku kejahatan seksual di Indonesia, maka muncul pro dan kontra dalam menyikapi hukuman tersebut. Pro dan kontra dari berbagai kalangan dalam menyikapi munculnya hukuman kebiri yang ditetapkan Presiden melalui Perppu nomor 1 Tahun 2016, menarik untuk di kaji dalam perspektif yang berbeda. Menurut Mahfud MD bahwa kontroversi mengenai hukuman kebiri merupakan sesuatu yang wajar. Inilah politik hukum baru. Hukuman kebiri itu belum dikenal selama ini dan kalau dari sudut konstitusi setiap penentuan hukum dibolehkan asal diatur dengan undang-undang. Langkah Presiden RI membuat Perppu sudah tepat.

Sebagai politik hukum baru, langkah Presiden memang sudah tepat, namun yang di permasalahan oleh berbagai kalangan termasuk para akademisi, kehadiran hukum kebiri dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 apakah tidak melanggar HAM ?

B. Pembahasan

1. Memaknai dan Memahami Pengertian Hukum Kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, kebiri adalah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau memotong ovarium pada hewan betina. Penjelasan

selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Kebiri juga dapat diartikan sebagai memandulkan manusia, hal ini berhubungan dengan memberhentikan produksi mani karena kalenjar testisnya dihilangkan. Kemudian, masih terkait dengan kebiri pada manusia, situs Wikipedia menjelaskan dari sisi sejarahnya. Pada zaman dahulu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidur para putri dan selir-selir kaisar. Lalu, kaisar mengharuskan memotong testis si penjaga laki-laki tersebut untuk menghindari zina ke putri atau selir-selirnya. Dari kebiasaan ini, kebiri juga menjadi hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada zaman itu.⁶⁷ Lain halnya dari sejarah Eropa dan Timur Tengah, kebiri dilakukan sebagai simbol perampasan “kekuasaan”. Kebiri ini dilakukan ketika peperangan telah selesai dan pihak yang menang akan memotong penis dan testis prajurit yang mati sebagai simbol mendapatkan kekuasaan. Dari penjelasan sebelumnya, kebiri dibagi menjadi dua jenis.⁶⁸

a. Kebiri fisik

b. Kebiri kimia

Kebiri fisik merupakan kebiri yang memotong penis dengan utuh. Akan tetapi, kebiri kimia adalah prosedur kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon untuk mematikan

⁶⁷ <https://www.selasar.com/budaya/mengenal-kembali-istilah-kebiri>, di akses pada hari Senin, 8 Agustus 2016

⁶⁸ *Ibid.*

hormon testosteron yang ada di testis laki-laki. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiru kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemeriksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.⁶⁹

2. Hukum Kebiri Dalam Perppu nomor 1 Tahun 2016

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang, untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapannya. Karena hukumnya tidak jelas dan

⁶⁹http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd diakses tanggal 8 Agustus 2016

tidak lengkap, maka harus dicari dan diketemukan. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon keinginan para pihak keluarga korban kejahatan seksual bahkan berujung pada kematian, seperti kasus Yuyun di Bengkulu. Masyarakat luas juga meminta agar pemerintah secepatnya mengeluarkan sanksi yang berat terkait dengan maraknya atau munculnya beberapa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan akhir-akhir ini. Sebenarnya, sanksi ataupun hukuman untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah ada di dalam UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun hukuman ataupun sanksi tersebut nampaknya diabaikan, bahkan oleh hakimpun tidak dilaksanakan secara maksimal.

Lahirnya hukum kebiri yang ditetapkan pemerintah melalui Perppu nomor 1 tahun 2016, merupakan langkah menuju hukum yang progresif. Hukuman tambahan berupa kebiri atau kastrasi akan segera diberlakukan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Jika dilihat dari perspektif politik hukum, lahirnya Perppu merupakan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷⁰

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah “Hukum untuk manusia” bukan sebaliknya.⁷¹ Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser teori dari factor hukum ke factor manusia.⁷² Konsekuensinya hukum bukanlah sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*Law as a process, Law in the making*), yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.2

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.57.

⁷² *Ibid.*

rakyat.⁷³ Hukum kebiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah lahir tanpa sebab, melainkan merespon tuntutan masyarakat terhadap pelaku kejahatan seksual sudah merupakan kejahatan luar biasa.

Perppu nomor 1 Tahun 2016 mengubah 2 pasal dari UU No. 23 tahun 2002 sebelumnya, yakni Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah Pasal 81 A. Berdasarkan pasal 81 ayat 3-7 Perppu Perlindungan anak, pasal 81 ayat 3, 4, dan 5 ; Hukum kebiri akan diberikan kepada; Pendidik anak, pengasuh secara bersama-sama atau *gang rape*. Syarat khusus yang harus dipenuhi; Pertama, tercantum dalam ayat 4, Sudah melakukan kejahatan terhadap anak secara berulang. Kedua, diatur dalam ayat 5, pelaku anak, aparat perlindungan anak, anggota keluarga dan masyarakat sipil yang melakukan pelecehan seksual menyebabkan korban terluka berat, dan sakit, memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat (5) Perppu no. 1 tahun 2016). Sedangkan hukuman tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke public, serta pemasangan alat deteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)). jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, atau meninggal. Jadi, hukum kebiri di dalam Perppu tersebut tentunya tidak serta merta setiap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak akan

⁷³ *Ibid.*

diberikan hukuman kebiri. Hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan setelah melaksanakan hukuman pokok. Tujuan hukuman kebiri agar menjadikan efek jera bagi pelaku.

Kebiri disebut juga dengan pegebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi ovarium pada betina. Sebenarnya ada dua bentuk kebiri, kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa. Kebiri kimiawi dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testoteron menjadi berkurang. Bisa melalui pil atau suntikan hormon anti-androgen. Pada umumnya yang digunakan adalah Depo –provera. Depo provera adalah obat KB yang sudah biasa dipakai perempuan. Cara menyuntikkannya adalah sama dengan suntikan Kb, bisa di bagian lengan, paha dan bokong.

Di dalam Perppu nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelakubisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Dokter spesialis neorologi, Roslan Husni Hasan mengatakan kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang. Caranya menyuntikkan hormon.

Menurut pakar Hukum Pidana UII Yogyakarta, Ari Wibowo,MH di beberapa Negara ada dua hukuman kebiri,

sebagai punishment atau hukuman, dan treatment atau perawatan. Konsekuensinya, ketika menjadikan hukuman kebiri sebagai treatment, maka tidak termasuk bagian untuk memberikan efek jera. Di Indonesia, hukuman kebiri sebagai punishment atau hukuman. Walaupun difungsikan sebagai hukuman tambahan untuk memberikan efek jera. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai Negara seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia serta beberapa Negara bagian Amerika Serikat.

Jika dilihat dari konsep hukum progresif, ditetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual sebenarnya bertolak dari realitas empirik mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena masyarakat selalu bergerak terus menerus sepanjang masa, seperti air mengalir yang tidak pernah dari bawah ke atas namun selalu dari atas ke bawah, demikian juga halnya dengan mencapai kebenaran yang senantiasa selalu melihat realitas masyarakat dan hukum. Pemikiran dari Satjipto Rahardjo tersebut memberikan eksistensi dari hukum progresif bukanlah sebagai suatu konsep hukum yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan teori hukum lainnya. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja tetapi mencari dan menemukan

makna sebenarnya dari suatu peraturan,⁷⁵ karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.⁷⁶ Makna dan nilai hukum itu menghendaki kebahagiaan bagi sekalian anggota masyarakat.⁷⁷ Hukum progresif mencoba membongkar cara-cara berhukum yang telah mengakar tersebut dengan kata kunci hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia dipaksa paksa untuk tunduk pada hukum.

3. Hukum Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷⁸ Hak hidup, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, yang terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi yang dalam perkembangannya kemudian di

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, penerbi Bukum Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 154.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

masa modern hak-hak dasar ini bertambah jumlahnya dan menjadi konsep utama dalam pemikiran tentang demokrasi.⁷⁹

Di Indonesia, pengaturan HAM diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apapun pengertian tentang HAM, HAM tidak boleh dilanggar oleh pemilik HAM.

HAM dalam perspektif UUD 1945, ditegaskan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28 A sampai dengan 28J. Pasal 28J ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang **wajib menghormati** hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1 berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sudah jelas sekali bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan. Seseorang berhak melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.

⁷⁸ C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 150.

⁷⁹ *Ibid.*

Disini dapat kita lihat bahwa hukuman kebiri yang sudah dijelaskan diatas itu sifatnya tidak permanen. Hukuman kebiri efeknya bisa berhenti dan pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun ereksi. Hukuman kebiri hanya akan menurunkan libido si pelaku tindak kekerasan seksual dan tidak sampai memotong alat vital pelaku kasus kekerasan seksual. Hukuman kebiri ini diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual sampai pelakunya insaf.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 33 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dari pasal ini jelas sekali bahwa seseorang itu berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hukuman kebiri kimiawi bukanlah hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat pelaku tindak kekerasan seksual. Karena hukuman kebiri kimiawi sifatnya tidak permanen dan hukuman ini hanya melemahkan libido dari si pelaku. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku tindak kekerasan seksual bisa kembali mendapatkan lagi fungsi seksualnya.

Sekarang dilihat dari sisi HAM korban tindak kekerasan seksual. Korban ini lebih berhak atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 1. Karena dia adalah korban dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam dari pelaku tindak

kekerasan seksual. Pelaku tindak kekerasan seksual telah merendahkan derajat dan martabat korban tindak kekerasan seksual. Korban dari tindak kekerasan seksual ini juga mendapat perlakuan kejam dari pelaku tindak kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan.

Selain Pasal 33 ayat (1), dalam Pasal 73 UU HAM juga ditegaskan tentang pembatasan hak-hak asasi manusia yang sebetulnya ditujukan untuk menghormati manusia yang lain. Dengan demikian baik UUD 1945 maupun UU HAM, hak asasi manusia itu tidaklah mutlak, artinya ada pembatasan-pembatasan. Menurut Jimly Asshidqy, HAM tidak boleh digunakan sebebasnya, karena dibalik HAM ada KAM, yakni kewajiban asasi manusia untuk menghormati HAM orang lain. Oleh karena itu, sifat HAM di Indonesia bukanlah individualistik. Setiap HAM harus dibatasi oleh HAM orang lain. Pengaturan HAM baik dalam UUD 1945 maupun UU HAM dapat di bagi dalam 2 bagian. *Pertama* adalah Hak untuk hidup diatur dalam pasal 28 A. *Kedua* diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tiap orang berhak berkeluarga dan berketurunan adalah hak asasi manusia sebagai makhluk social. Artinya ketika manusia itu bermasalah dengan lingkungan sosialnya terutama tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati HAM orang lain, maka hak tersebut dapat dan pantas dicabut.

Terkait dengan kontroversi dalam menyikapi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dilihat dari perspektif HAM tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda⁸⁰ mengatakan bahwa hukuman kebiri hanya diberikan untuk pelaku kejahatan seksual sadis, dan tidak dikenakan pada setiap pemerkosa. “Kebiri untuk pelaku kejahatan yang sadis, misal melakukan pemerkosaan berulang-ulang, memerkosa dengan menggunakan pacul dan barang lainnya,” katanya di Batam, Hukuman kebiri merupakan sanksi tambahan dari penetapan hakim sebelumnya, dan menurut dia, bukan pengganti atas vonis hakim. Ia membantah anggapan sebagian orang yang menilai hukuman kebiri berlebihan, karena kejahatan seksual menimbulkan luka sangat dalam, fisik dan mental. “Ada yang bilang kebiri melanggar hak asasi manusia, memangnya memerkosa itu tidak melanggar HAM?” katanya. Dalam keterangannya yang disampaikan pada Tanggal 5 Juni 2016 bahwa, dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu ada empat hal yang dibahas, antara lain pemberatan hukuman, menetapkan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa, pemberian tambahan hukuman berupa kebiri, dan meletakkan keping (chip) deteksi pada tubuh pelaku. “Diberi chip biar bisa diketahui ke mana mereka pergi,” Ia meminta masyarakat memahami kecilnya hukuman untuk

⁸⁰ <https://www.jurnalasia.com/nasional/kebiri-untuk-pelaku-kejahatan->

pelaku kejahatan seksual dengan korban Yuyun (15) yang diperkosa 14 pria, termasuk tujuh anak-anak di bawah umur, di Bengkulu.

Penerapan hukuman kebiri akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual.. Erlinda pun mengingatkan pelaku kejahatan anak di bawah umur, yang dalam UU disebutkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setengah dari semestinya. “Hukumannya 20 tahun dipotong setengah jadi 10 tahun,”

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait⁸¹, yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak. “Sangat yakin karena ada literaturnya,” Menurut dia, hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator ditambah dengan diterapkan sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum. “Ini kami harapkan memberikan efek jera. Dikebiri ini bukan diputus hasrat seksual tetapi dikontrol sehingga tidak melakukan tindakan seksual,” jelas dia. Dia menuturkan sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang menetapkan hukuman suntik kimia kebiri seperti Turki, Korea Selatan, beberapa negara di Amerika, Polandia, dan Jerman. Bahkan di Inggris pakai chip kepada pelaku untuk bisa dikontrol

seksual-sadis/di akses pada hari Selasa, 9 Agustus 2016.

pergerakannya. “Ini begitu seriusnya. Makanya kami apresiasi presiden yang menyetujui hukuman kebiri ini karena bukan hanya bentuk instruksi presiden tetapi masuk dalam Perppu,” Pada masa lalu, penghuni harem (rumah sejenis kepuntren di kerajaan-kerajaan di Jawa) dilayani kasim-kasim, alias laki-laki budak yang dikebiri agar tidak terjadi pelanggaran seksual antara mereka dengan selir-selir dan putri-putri raja. Sirait menambahkan, sejak 2013 Komnas Perlindungan Anak menyatakan, Indonesia darurat kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual. Hal ini karena angka kekerasan anak dan jumlah kasus terus meningkat, dengan cara yang sangat biadab dan sadis serta dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sementara itu, lanjut dia, penegakan hukum terhadap pelaku sampai saat ini tidak adil. “Untuk memutus mata rantai kasus kekerasan seksual pada anak, kami juga mendesak agar penegakan hukum terhadap pelaku ditambah yakni menambah hukuman maksimal 15 tahun menjadi seumur hidup, hukuman minimal 5 tahun menjadi 20 tahun.”

Jika dilihat dari perspektif hukum progresif, dimana hukum merupakan sebuah proses dan tidak pernah final. Hukum progresif adalah yang membebaskan, hukum yang membahagiakan, hukum yang memuat moral kemanusiaan. Hukum progresif bukan sekedar menerapkan aturan dan

⁸¹ <https://www.jurnalasia.com/ragam/pro-kontra-hukuman-kebiri-paedofil-terkendala-obat-suntik-yang-mahal/di-akses-pada-hari-Selasa,9-Agustus-2016>

hanya untuk memenuhi prosedur melainkan hukum yang harus dilihat sebagai persoalan manusia secara utuh. Hukum progresif adalah hukum yang diperlukan untuk manusia baik dalam aksi-interaksi dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alam semesta yaitu lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Pada prinsipnya, hukuman kebiri tidaklah bertentangan dengan HAM, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual.
Dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan hal seperti itu lagi.
- b. Bahwa pelaku tindak kekerasan seksual telah melanggar Hak Asasi Manusia korban dari tindak kekerasan seksual. Disini dilihat dari sisi korban tindak kekerasan seksual, bukan dari pelaku. Karena tidak akan adil bagi korban yang martabatnya telah direndahkan, yang dia telah mendapatkan tindak kekerasan dari pelaku, yang telah mendapat pukulan mental dan psikis, jika pelaku tindak kekerasan hanya dihukum penjara maupun denda.
- c. Sesuai yang telah dijelaskan di pembahasan, hukuman kebiri tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Karena hukuman kebiri ini adalah hukuman kebiri kimia sifatnya tidak permanen yang hanya melemahkan libido dari pelaku tindak kekerasan seksual.

Tidak sampai memotong alat vital. Hukuman kebiri ini juga dipantau dengan ahlinya.

- d. Karena sifatnya tidak permanen, si pelaku tindak kekerasan seksual masih bisa memiliki keturunan. Dan tidak melanggar HAM dari UUD 1945 pasal 28B yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunan.
- e. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 1. Hukuman kebiri ini bukanlah suatu tindak kekerasan yang merendahkan martabat seseorang. Hukuman kebiri ini adalah hukuman kebiri kimiawi yang sifatnya tidak permanen. Yang tidak sampai memotong alat vital pelaku tindak kekerasan seksual. Hukuman ini hanya bersifat sementara dan memiliki efek jera bagi si pelaku tindak kekerasan seksual.

C. Penutup

Hukum progresif adalah hukum yang pada hakikatnya mengatur perilaku manusia melalui norma-norma hukum yang diciptakan yang lebih mengutamakan keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan. Keadilan untuk para korban-korban kejahatan seksual. Apakah kita tidak menyadari bahwa yang perlu mendapat perhatian kita adalah HAM KORBAN, bukan condong kepada HAM PELAKU. Disini HAM korban diambil secara paksa dan tanpa bisa melawan. Apakah kita masih berfikir kasian terhadap pelaku ? Hukuman yang pantas diberikan bagi pelaku kejahatan seksual ini adalah

sebanding dengan hukuman mati dalam kasus narkoba. Kenapa hukuman mati diterapkan pada narkoba, salah satu alasannya adalah mengambil alih masa depan pemaikainya. Begitu juga pelecehan seksual terhadap anak, merampas masa depan dari anak dibawah umur.

Berangkat dari rasa empati terhadap korban-korban kejahatan seksual bahkan berujung pada kematian, maka hukum kebiri yang ditetapkan dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 merupakan kebutuhan hukum yang sangat mendesak untuk ditegakkan di negara hukum Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- C. de Rover, 2000, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud, MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa media, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang
-, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
-, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai pendidikan Manusia*, GentaPublishing, Yogyakarta

....., 2009 *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan ;

UUD 1945 RI

UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perppu nomor 1 Tahun 2016

Internet

<https://id.scribd.com/doc/316864617/kebiri-makalah>, d akses pada hari Senin, 8 Agustus , 2016

<https://www.selasar.com/budaya/mengenal-kembali-istilah-kebiri>, di akses pada hari Senin, 8 Agustus 2016

http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd diakses tanggal 8 Agustus 2016

<https://www.jurnalasia.com/nasional/kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-sadis>/di akses pada hari Selasa, 9 Agustus 2016.

<https://www.jurnalasia.com/ragam/pro-kontra-hukuman-kebiri-paedofil-terkendala-obat-suntik-yang-mahal>/di akses pada hari Selasa, 9 Agustus 2016

HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS*

H. A. Khumaidi Ja'far

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual (terhadap anak-anak) di bawah umur (*fedofilia*) belakangan ini semakin merajalela, hal ini selain kurangnya perhatian berbagai pihak juga karena belum adanya sanksi/hukum yang tegas bagi para pelaku tindak *fedofilia*. Berkaitan dengan hal ini, munculah satu opsi yang dianggap cocok dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual, yaitu hukuman kebiri.

Praktik pengebirian sudah lama dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadangkala dilakukan atas dasar alasan keagamaan dan kadangkala dilakukan atas dasar sosial budaya, hal ini sebagaimana yang terjadi di Negara-negara Erofa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur, sementara di Indonesia, istilah kebiri baru menjadi heboh setelah munculnya Perpu nomor 1 tahun 2016, akibat semakin maraknya kejahatan seksual terhadap anak-anak, sebagaimana yang dialami anak-anak di bawah umur di Bengkulu dan Kediri.

Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis maupun penisnya. Praktik ini tentunya sangat berbahaya dan sering mengakibatkan kematian akibat pendarahan, sehingga dalam beberapa kebudayaan, pengebirian disamakan dengan hukuman mati.

Berdasarkan hal-hal di atas, lantas apa hukuman kebiri? Bagaimana cara eksekusinya dan bagaimanapun posisi hukum kebiri dalam pandangan hukum Islam, psikologi dan kesehatan

B. Pembahasan

1. Pengertian Kebiri

Kebiri (*al-ikhsha*) artinya pemotongan dua buah dzakar (*al-Khushyatain*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis

(*Dzakar*). Dengan demikian kebiri dapat berupa pemotongan testis dan penis. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. (lihat dalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* hlm. 150, *al-Mu'jamul Wasith* 1 hlm. 269, *al-Ahkam al-Fiqhyah al-Muta'alliqah bi al-Syahwat* hlm. 88).

2. Metode Kebiri

Secara garis besar terdapat dua macam metode kebiri, yaitu metode fisik dan metode hormonal (*injeksi*) atau metode kimia. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Dalam hal ini setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, berarti sudah dihilangkan testosteron, sebagai hormon pembangkit gairah seks, akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks, dan sekaligus menjadi mandul permanen. Sedangkan metode kebiri hormonal/kimiawi dilakukan bukan dengan memotong testis/penis, tetapi dengan cara *injeksi* (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri atau dengan meminum pil. Metode kebiri hormonal/kimiawi tidak bersifat permanen, sebab apabila injeksi/pil dilakukan secara berulang-ulang, maka hormon testosteron akan menurun dan gairah seks juga akan ikut turun. Tetapi apabila injeksi/pil hormon testosteron dihentikan, maka keadaan orang yang di kebiri akan pulih seperti semula. (lihat Jawa Pos tanggal, 22 Oktober 2015).

3. Hukuman Kebiri

Berbicara tentang hukuman kebiri tentunya menuai pro dan kontra, diantaranya;

- a. Menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu No. 1 tahun 2016), bahwa sanksi bagi pelaku kejahatan seksual diperberat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun.
- b. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (*fedofilia*) adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta-300juta.
- c. Menurut mensos khofifah Indar Parawansa, bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*fedofilia*) setuju jika

- dilakukan pemberatan hukuman, termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido
- d. Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa kejahatan seksual lebih miris dari kejahatan narkoba karena bisa merusak masa depan korbannya. Oleh karena itu orang yang memperkosa anak kecil tidak cukup dihukum 9 tahun, kalau perlu lebih baik di hukum mati. Sehingga kejahatan seks di Indonesia yang menimpa anak-anak di bawah umur harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah dengan cara memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.
 - e. Menurut dr. Boyke Dian Nugraha (pakar seksologi), bahwa hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif, sebab para pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa yang sakit itu adalah jiwanya, maka hukuman kebiri tidak akan menyelesaikan jiwannya. Oleh karena itu tidak setuju apabila hukuman kebiri itu diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual. Cara terbaik menyikapi *fedofilia* adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Demikian juga anak-anak diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual.
 - f. Menurut Seto Mulyadi (Pemerhati Anak), bahwa pemerintah harus mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, mohon dipertimbangkan aspek kesehatan dan psikologisnya, sebab secara psikologis pelaku yang dikebiri dapat bertidak lebih agresif, sehingga pelaku bukan sekedar mengarah kepada kekerasan seksual, tetapi juga dapat mengarah pada kekerasan segala-galanya.
 - g. menurut HM. Prasetyo (Jaksa Agung), bahwa kejahatan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa, sehingga harus ada penanganan proses penegakan hukuman yang luar biasa.
 - h. Menurut Badrodin Haiti (Kapori) dan Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Pelindungan Anak), bahwa hukuman

kebiri harus dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak.

4. Dampak Hukuman Kebiri

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha (pakar seksologi dan ahli kandungan), bahwa hukuman kebiri (kimia) bisa laki-laki menjadi seperti perempuan, yakni payudara tumbuh dan masa otot berkurang/lemah, mudah diabetes, menjadi gemuk dan tidak ada nafsu seperti mayat. sedangkan menurut Wimpie Pangkahila (Ketua Bagian Antologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran UDAYANA), bahwa hukuman kebiri berdampak pada hilangnya nafsu secara seksual/libido, tulang menjadi keropos, otot berkurang, lemak meningkat, gairah hidup berkurang dan tidak ada lagi dorongan seksual.

Selain itu dampak hukuman kebiri dapat menimbulkan penuaan dini pada tubuh, meningkatkan tulang keropos dan meningkatkan resiko penyakit jantung.

5. Pandangan Hukum Islam dan Medis tentang Hukuman Kebiri

Para ulama sepakat bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak (*fedofilia*) hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut;

- a. Syari'at Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani;

“hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut bertentangan dengan syari'at, yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan berjihad melawan orang kafir”. (lihat Fathul Bari 9/119).

Demikian juga dalam kitab ensiklopedi fiqih *Al-Mausu'ah Fiqhiyyah* dijelaskan:

“melakukan kebiri bagi manusia adalah haram, baik kecil maupun besar karena terdapat larangan hal tersebut” (lihat al-Mausu'ah Fiqhiyyah 9/120-121).

- b. Syari'at Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pelecehan seksual pada anak (*fedofilia*) sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga haram melakukan jenis hukuman di

luar ketentuan syari'ah Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apalagi sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dari syari'at Islam. Oleh karena itu haram hukuman menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia*, sebab syari,at Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku *fedofilia*.

- c. Meskipun metode kebiri yang digunakan adalah metode kimia/injeksi, maka hukumannya tetaplah dilarang (haram), karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan, padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas RA.

“Rasulullah SAW., telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki (HR. Bukhori No. 5546).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas bahwa hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia* hukumnya adalah haram. Bahkan hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia* juga sangat tidak manusiawi dan merupakan penyiksaan, serta bukan tujuan dari syari'at Islam, yaitu menjaga keturunan dan

membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani “melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat, yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa meniadakan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan dan merubah ciptaan Allah”

Demikian juga menurut ulama-ulama kontemporer seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, asosiasi pondok pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Mereka beralasan bahwa kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiyah. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Mas’ud RA yang menyatakan;

”bahwa kami pernah berperang bersama Nabi SAW., sedangkan kami tidak bersama Istri-Istri lalu kami bertanya kepada Nabi SAW., bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu” (HR. Bukhori No. 4615)

C. Kesimpulan

1. kebiri berarti pemotongan dua buah dzakar, yakni berupa pemotongan testis dan penis
2. Kebiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia, yang keduanya sama-sama bertujuan untuk menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul
2. Hukuman kebiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum dan medis, dimana ada sebagian pendapat seperti Seto Mulyadi dan dr. Boyke, dimana keduanya menyayangkan adanya hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia*, dan sebagian pendapat seperti Jimly Assiddiqie dan Khofifah Indra Parawansa bahwa pelaku *fedofilia* harus diberikan hukuman yang berat, kalau perlu hukuman mati.
3. Dampak hukuman kebiri antara lain: hilangnya nafsu secara seksual/libido, tulang menjadi keropos, otot berkurang, gairah hidup berkurang, mudah terkena penyakit diabetes, penuaan dini pada tubuh dan meningkatnya resiko penyakit jantung.

4. Para ulama telah sepakat bahwa hukuman kebiri hukumnya adalah haram.

D. Daftar Pustaka

Abu Dawud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin amr, *Sunan Abu Dawud*, Mesir: Wijarah al-Auqafal-Misriyyah, tt.

Barri, Zakaria, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Mesir: al-Ittihad al-Arbi al-Thiba'ah, 1980.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Mahkota, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

<https://muslim.or.id/2804>

<https://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html>.

Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

....., Al-Asqalani, *Fathul Barri*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zuhdi, Masfuk, *Masail al-Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

MENANTI EFEKTIVITAS PERPPU KEBIRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Marwin

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Abstrak

Perppu Kebiri mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, juga menambahkan dua pasal baru, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Perppu Kebiri dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancamkan kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Efektivitas Perppu kebiri dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perppu Kebiri sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

A. Pendahuluan

Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 25 Maret 2016 telah menandatangani dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Perppu Kebiri. Perlu diketahui bahwa Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagaimana dimaklumi bahwa pemberlakuan suatu Perppu termasuk Perppu Kebiri, haruslah didasarkan pada adanya keadaan darurat yang menjadi latar belakangnya. Nampak bahwa banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, merupakan pemicu diberlakukannya Perppu Kebiri. Contoh tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang banyak menjadi perhatian masyarakat, adalah kasus perkosaan terhadap Yuyun, seorang siswa SMP di Bengkulu, yang menjadi korban pelampiasan nafsu seksual 14 orang laki-laki. Yuyun tidak hanya menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga harus kehilangan nyawa ditangan 14 orang yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

Semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun, telah memperoleh sanksi pidana dari pengadilan. Bahkan 4 orang pelaku yang masih anak-anak, mendapatkan sanksi pidana maksimal berupa penjara selama 10 tahun.⁸² Namun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Pendapat ini dapat dibenarkan, karena setelah peristiwa yang menimpa

⁸² Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pidana penjara 10 tahun hanya dapat dikenakan untuk anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Yuyun, ternyata masih banyak Yuyun-Yuyun lain yang juga menjadi korban.

Banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ditambah dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintah segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, dapat dikatakan menjadi latar belakang diberlakukannya Perppu Kebiri. Pro kontra bermunculan seiring dengan pemberlakuan Perppu Kebiri, sebagian masyarakat menyambut dengan baik pemberlakuan Perppu tersebut, namun ada pula anggota masyarakat yang tidak menerima, karena menganggap bahwa perppu tersebut berpeluang melanggar hak-hak asasi dari pelaku.

Terlepas dari adanya pro kontra, pertanyaan yang ditunggu jawabannya oleh masyarakat saat ini, adalah mampukah Perppu Kebiri mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas atau paling tidak mengurangi angka korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pertanyaan ini wajar diajukan, mengingat bahwa sebuah Perppu mempunyai masa berlaku yang terbatas. Perppu hanya berlaku untuk waktu paling lama satu tahun, dan harus diajukan menjadi Undang-Undang setahun kemudian. Namun jika DPR menolak menaikkan derajat perppu menjadikan Undang-Undang, maka perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸³ Oleh karena itu masyarakat menantikan efektivitas Perppu Kebiri, jika DPR menilai bahwa Perppu Kebiri berhasil mengemban misinya, bukan tidak mustahil

⁸³ Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan

DPR akan mengesahkannya menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, jika DPR menganggap bahwa Perppu Kebiri gagal melaksanakan misinya, bukan tidak mustahil pula DPR akan menolak menjadikannya Undang-Undang.

B. Pembahasan

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁸⁴ yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan

DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

⁸⁴ Selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang juga mengatur dan berkaitan dengan anak, antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Sisi lain pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu Kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perppu Kebiri mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu Perppu Kebiri juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan dengan Perppu Kebiri dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual

terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Ancaman pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam Perppu Kebiri dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain berwujud:

1. Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
2. Penambahan masa pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok;
3. Ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
4. Ancaman tindakan berupa kebiri kimia; dan
5. Pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperubahannya dilakukan melalui Perppu Kebiri, redaksional selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh).
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D⁸⁵ Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa:

1. Korban lebih dari satu orang;
2. Korban mengalami luka berat;
3. Korban mengalami gangguan jiwa;
4. Korban menderita penyakit menular;
5. Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban;
dan/atau
6. Korban meninggal dunia.

Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Perppu Kebiri sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat

⁸⁵ Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya berbunyi setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

penerapan yang diatur dalam Perppu Kebiri sangat mungkin terpenuhi. Hal ini berbeda dengan syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁸⁶ Dimana syarat-syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸⁷ sangat sulit terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Perppu Kebiri. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) dijatuhi pidana mati.

Perppu Kebiri selain mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berupa pidana mati, penjara dan denda, juga mengancamkan pidana tambahan yang dapat menyertai pidana pokok berupa pengumuman identitas pelaku. Pidana tambahan ini tentu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa

⁸⁶ Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi jika terpenuhi keadaan tertentu sebagai syarat pemberatan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana.

⁸⁷ Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati, agar tidak menjadi korban berikutnya dari pelaku setelah selesai menjalani pidana. Pidana tambahan ini, pada prinsipnya sama dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang diatur dalam KUHP.

Dengan diumumkannya putusan hakim, maka publik diperingatkan atas kepercayaannya terhadap terpidana tersebut. Pengumuman putusan hakim biasanya diumumkan melalui media massa dan biayanya ditanggung oleh terpidana.⁸⁸ Perppu Kebiri tidak dengan tegas mengatur kepada siapa biaya atas diumumkannya identitas pelaku sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan mendampingi pidana pokok. Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius, karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan yang menunjukkan karakter tindakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁸⁹

Perppu Kebiri selain mengatur pemberatan sanksi pidana, ternyata juga telah menentukan sanksi selain pidana berupa tindakan, yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pengaturan tentang pelaksanaan sanksi tindakan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan

⁸⁸ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 218.

Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut, sampai saat ini masih dinantikan keberadaannya.

Kebiri (pengebirian atau kastrasi) sendiri diartikan sebagai tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia.⁹⁰ Kebiri dalam KBBI diartikan sebagai sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.⁹¹ Kebiri dimaksudkan untuk menghilangkan atau paling tidak membatasi kemampuan organ reproduksi manusia, dengan menggunakan cara-cara tertentu atau menggunakan bahan-bahan tertentu.

Tindakan kebiri kimia diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan syarat:

1. Sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
2. Jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua

⁸⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 404.

⁹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/kebiri> diakses pada Senin, 8 Agustus 2016, jam 08.30 WIB.

tahun, yang pelaksanaannya setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku harus diberikan bersamaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya, dimana biasanya sanksi tindakan yang diatur dalam undang-undang lain bersifat meniadakan penjatuhan pidana pokok kepada pelaku. Sanksi tindakan yang diatur Perppu Kebiri, jika dicermati lebih seksama sebenarnya lebih mengarah pada pidana tambahan, karena ternyata sanksi tindakan tersebut masih memberikan penderitaan kepada pelaku, terlebih lagi tindakan kebiri kimia tersebut dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Terdapat perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam teori hukum pidana. Secara tradisional perbedaan itu menurut Sudarto dikatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat, dan untuk pembinaan serta perawatan si pembuat. Secara dogmatik pidana dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang tidak mampu bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan tindakan

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 521.

kepadanya.⁹² Sanksi pidana dan sanksi tindakan juga dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya serta bentuk pencelaan terhadap perbuatan pelaku tersebut, sedangkan sanksi tindakan sebagai sanksi jenis lain dalam hukum pidana (bukan jenis sanksi pidana).⁹³ Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku agar merasakan nestapanya, sedangkan tindakan adalah sanksi yang tidak bersifat pembalasan, melainkan tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus.⁹⁴ Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan), sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁹⁵

Beberapa contoh sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang tindak pidana lainnya, antara lain:

1. Penyerahan (pengembalian) pelaku kepada orang tua atau walinya;
2. Penyerahan pelaku kepada lembaga-lembaga sosial tertentu;

⁹² Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.

⁹³ T.J. Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 106.

⁹⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 222.

⁹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 204.

3. Perintah agar pelaku mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan tertentu;
4. Perawatan pelaku di rumah sakit jiwa;
5. Rehabilitasi pelaku dari ketergantungan obat-obatan tertentu.

Sanksi tindakan juga diatur dalam RUU KUHP, yang diharapkan segera disahkan sebagai wujud pembaharuan atas KUHP yang sekarang berlaku, dimana KUHP yang saat ini berlaku adalah warisan dari penjajah Belanda. Tindakan tersebut antara lain: 1) perawatan di rumah sakit jiwa; 2) penyerahan kepada pemerintah; atau 3) penyerahan kepada seseorang. Tindakan lain yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok adalah: 1) pencabutan surat izin mengemudi; 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) latihan kerja; 5) rehabilitasi; dan/atau 6) perawatan di lembaga.⁹⁶

Walaupun di tingkat praktis, perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa diadakan pembedaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu?”.⁹⁷ Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi

⁹⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip...*, hlm. 413.

pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenalan penderitaan, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.⁹⁸

Perppu Kebiri mengatur bahwa sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan baik kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, meskipun syarat untuk penjatuhan pidana tambahan dan tindakan terpenuhi. Dengan demikian terhadap anak yang melakukan tindak pidana⁹⁹ kekerasan seksual yang sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*), korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita/tertular penyakit menular (misal HIV/AIDS), korban menderita gangguan atau kehilangan fungsi organ reproduksi, tetap tidak diperbolehkan untuk dikenai pidana tambahan dan tindakan yang diatur dalam Perppu Kebiri.

Selain tidak dapat dijatuhkan kepada anak, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga tidak dapat dikenakan kepada orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana

⁹⁷ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31-32.

⁹⁸ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi...*, hlm. 32.

⁹⁹ Anak pelaku tindak pidana adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

kekerasan seksual terhadap orang (dewasa) juga. Demikian juga dengan pidana mati, juga tidak dapat dikenakan terhadap orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang dewasa juga. Hal ini dikarenakan pengaturan pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut diatur dalam Perppu yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berstatus orang dewasa.

Terhadap anak juga tidak diperbolehkan untuk dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, meskipun ketentuan yang mengatur tentang penjatuan pidana mati terpenuhi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jika anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai telah diubah sebanyak dua kali (terakhir dengan Perppu Kebiri), maka terhadap anak tetap tidak boleh dikenakan pidana mati. Ketentuan ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁰⁰ Dengan

¹⁰⁰ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selengkapnya redaksionalnya berbunyi Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam

demikian penjatuhan pidana penjara 10 tahun terhadap 4 orang tersangka pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun di Bengkulu, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (6) di atas.

Efektivitas Perppu kebiri dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban Perppu Kebiri dapat diwujudkan. Tetapi jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban Perppu Kebiri akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perppu Kebiri sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

C. Penutup

1. Perppu Kebiri diberlakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, karenanya perlu menambah pidana pokok berupa pidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

mati dan pidana penjara seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

2. Perppu Kebiri selain menambah berat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menambahkan pula ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
3. Pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, dalam pelaksanaan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
4. Masyarakat menantikan efektivitas Perppu Kebiri untuk mengatasi atau paling tidak menurunkan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku membatasi jangka waktu berlakunya Perppu Kebiri.
5. Efektivitas penegakkan Perppu Kebiri sangat tergantung pada hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang (perppu) itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

D. Pustaka Bacaan

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta. 2002.
- Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. 2009.
- T.J. Gunawan. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Genta Press. Yogyakarta. 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENAKAR KEBIJAKAN HUKUM KEBIRI TERHADAP PELAKU FEDOFILIA*

Abdul Qodir Zaelani

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Dalam konteks global, Indonesia menempati urutan ke 6 negara dengan angka pemerkosaan anak tertinggi dunia.¹⁰¹ Peringkat pertama diraih Inggris,¹⁰² disusul berturut-turut Afrika Selatan,¹⁰³ India,¹⁰⁴ Zimbabwe,¹⁰⁵ Amerika Serikat,¹⁰⁶ dan

* Makalah ini disampaikan pada acara Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu 10 Agustus 2016.

¹⁰¹ <http://www.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807>, diakses pada 8/9/2016

¹⁰² Hampir lima persen bocah di Inggris mengalami pelecehan seksual. 90% di antaranya dilakukan oleh kenalan sendiri. Tahun 2012/13, kepolisian mencatat lebih dari 18.000 kasus pelecehan seksual terhadap bocah di bawah 16 tahun. Pada tahun yang sama 4171 pelecehan dan pemerkosaan dilakukan terhadap bocah perempuan di bawah usia 13 tahun.

¹⁰³ Setiap tiga menit seorang bocah diperkosa di Afrika Selatan, INI MENURU PENELIIAN Trade Union Solidarity Helping Hand. Studi lain mengungkap satu dari empat laki-laki mengaku pernah memperkosa seseorang dan sepertiganya meyakini perempuan menikmati pemerkosaan. Beberapa korban pemerkosaan bahkan baru berusia enam bulan. Korban juga sering terinfeksi HIV/AIDS setelah diperkosa.

¹⁰⁴ Asian Centre for Human Rights melaporkan pelecehan seksual kepada anak-anak sedang mewabah di India. Laporan terakhir menyebut ada lebih dari 48.000 bocah yang diperkosa selama sepuluh tahun sejak 2001. Tahun 2011 saja kepolisian mencatat 7112 kasus pemerkosaan anak-anak. Menurut IB Times, pelaku pemerkosaan anak di India mencakup ayah, saudara, tetangga, dan guru sekolah>

¹⁰⁵ Kepada haian local NewsdeZimbaw, kepolisian mengklaim kasus pemerkosaan anak-anak meningkat tajam sejak 2000, dai 2883 kasus menjadi 3172 di tahun berikutnya. Dalam banyak kasus, kata kepolisian, "pelaku berasal dari lingkungan keluarga". Sebuah rumah sakit di Harare mengabarkan, pihaknya menangani lebih dari 30.000 bocah korban pemerkosaan dalam periode empat tahun.

Indonesia.¹⁰⁷ Dalam konteks Indonesia, berdasarkan catatan Yayasan Kita dan Buah Hati mendaulat Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kasus pelecehan seksual tertinggi.¹⁰⁸ Hal ini didasarkan hasil penelitian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, daerah Aceh pada tahun 2015 mencatat 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Disusul Jawa Timur dengan 166 kasus, Jawa Barat setiap bulan 17 perempuan di Jawa Barat mengalami pelecehan seksual, DKI Jakarta (2014) terdapat 63 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan 300 pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, dan Sumatera Selatan tercatat 111 kasus pelecehan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ “Akan ada 500.000 bayi lahir tahun ini di Amerika Serikat yang akan menjadi korban pelecehan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun,” tulis Children assessment Center (CAC). Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak tergolong tinggi di AS. Menurut data departemen Kesehatan, 16% remaja antara 14 hingga 17 tahun mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan.

¹⁰⁷ Kendati tidak termasuk dalam daftar Negara dengan tingkat pelecehan seksual anak tertinggi di dunia, Indonesia mencatat kemunduran dalam hal perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak mencatat, 2014 silam dari 2.726 kekerasan terhadap bocah, 56% di antaranya berupa pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut Cuma 179 yang mengadu kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁰⁸ Bandingkan dengan hasil penelitian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan -berarti sekitar 881 kasus setiap hari. Angka tersebut didapatkan dari pengadilan agama sejumlah 305.535 kasus dan lembaga mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Menurut pengamatan mereka, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat 9% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan paling menonjol sampai sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Lihat http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual, diakses pada 9/8/2016

¹⁰⁹ <http://www.dw.com/id/inilah-provinsi-paling-rawan-pelecehan-seksual/g-19260614>, diakses pada 8/9/2016

B. Pembahasan

1. Pra-Wacana: Sebuah Nalar Epistemologis

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara darurat kekerasan seksual terhadap wanita dan anak. Kekerasan seksual menjadi kejadian yang *ekstra ordinary*, maka penanganannya pun ekstra. Tidak berlebihan jika KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial memberikan wacana hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen,¹¹⁰ mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus. KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena dua alasan. *Pertama*, pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata

¹¹⁰ Suntik antiandrogen adalah salah satu bentuk kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Lihat KPAI: *Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil*, Sabtu, 10 Mei 2014. 19:18 WIB dalam <http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>. diakses pada Selasa, 9 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB.

rantai dan anak pinak”,¹¹¹ ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari. Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia. *Kedua*, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban. Ketiga, beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Di mana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.¹¹² Negara-negara tersebut yang telah menggunakan hukuman kebiri berikut dinamikanya bisa dilihat pada tabel berikut ini.¹¹³

No	Negara	Keterangan	Perkembangan Terbaru
1	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di	Hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik.

¹¹¹ Lihat tulisan penulis dengan judul “*Melawan (Gerak) Predator Anak*” yang pernah dimuat di Lampung Post. Dalam tulisan tersebut penulis menyatakan bahwa predator akan melahirkan predator baru. Predator baru tersebut adalah korban. Ini semacam pecah sel.

¹¹² Susanto, *Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual: Perlukah?*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam diskusi FH UI

¹¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), h. 10-13

		<p>tahun 2011.</p> <p>Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengijinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.</p>	
2	Inggris	<p>Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.</p>	<p>Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana Pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal</p>

			dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.
3	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogester on asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual.
4	Rusia	Menerima <i>chemical castration</i> untuk pelaku kejahatan seksual	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang

		<p>terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter.</p>	<p>mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.</p>
5	Polandia	<p>Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman</p>	

		ini.	
6	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
7	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks Pada tanggal 5	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).

		Juni, 2012	
8	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009
9	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10	Australia	Kastrasi dalam	Pada tahun 2010

		<p>hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.</p>	<p>lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri</p>
--	--	---	--

			kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
11	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.	Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negaranegara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walaupun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak	

		sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana	
13	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
14	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
15	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.	
16	India	Pengadilan di selatan India	Usulan ini mendapat

		mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	tantangan karena dianggap kurang efektif.
17	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	
18	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil.	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan merumuskannya. Sebuah draf berjudul.

19	Belanda	<p>Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.⁵⁷ Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.</p>	
20	Perancis	<p>Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian</p>	

		dilakukan secara kimia.	
21	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
22	Ceko	sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual.	Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001- 2006
23	Portugis	Pada tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara:	

		Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.	
24	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini.	Banyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu “secara etis dan praktis sangat sulit untuk melaksanakan.” Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif.
25	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangka hukum	

		dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.	
--	--	---	--

Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan, kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengadopsi sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak, secara epistemologis, kejahatan seksual telah menjadi wabah yang perlu segera ditangani dengan serius. Keberadaan UU Perlindungan Anak dianggap belum mampu meminimalisasi, mencegah, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

2. Wacana Perppu: Sebuah Polemik

Adanya wacana Perppu mengadopsi sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual menuai kontradiksi di tengah masyarakat. Terdapat dua kubu dalam menanggapi wacana Perppu tersebut. Kubu pertama mengapresiasi ide yang dilontarkan pemerintah. Salah satu yang menyetujui ide tersebut adalah KH Cholil Nafis Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyatakan pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera

(*zawajir*). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan *zawajir* tadi.¹¹⁴

Kubu kedua, menolak ide dari pemerintah. Mereka berasal dari ormas Islam Indonesia seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah. Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi, 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?'. Maka Nabi melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban). Alasan selanjutnya dari mereka adalah kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri

¹¹⁴ Hannan Putra, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i*, Republika, Jumat 30 Oktober 2015. Bandingkan dengan pendapat ulama klasik yang menolak hukuman kebiri. Mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk man usia. Di antaranya Imam Ibnu Abdil Bar dalam *al-Istidzkar* (8/433), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* (9/111), Imam Badruddin al-'Aini dalam *'Umdatul Qari* (20/72), Imam al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkam Alquran* (5/334), Imam Shan'ani dalam *Subulus Salam* (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Syahwat* bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

fisik seperti perempuan.¹¹⁵ Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fikih mengatakan, "*al-Wasilah ila al-Haram Muharromah*" (Segala perantara menuju yang haram, hukumnya haram juga).

Selain ormas Islam di atas yang menolak, aktivis jender dan LSM yang bergerak pada wilayah feminisme yang menamakan dirinya Aliansi 99 menolak rencana kebijakan pemerintah.¹¹⁶

¹¹⁵ Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA, "Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki." (HR Bukhari).

¹¹⁶ LSM tersebut adalah ICJR, ELSAM, ECPAT INDONESIA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, LBH Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI, WALHI, KePPaK Perempuan, Institut Perempuan, HRWG, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), ASOSIASI LBH APIK, Perempuan Mahardika, Positive Hope Indonesia, KONTRAS, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) – Jakarta, OPSI, Lentera Anak Pelangi, PSHK, LDD, SAMIN, Gugah Nurani Indonesia, Sahabat Anak, Perkumpulan Magenta, Syair.org, Tegak Tegar, Simponi Band, YPHA, Budaya Mandiri, IMPARSIAL, Yayasan Pulih, Kriminologi UI, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, KPKB, Institut KAPAL Perempuan, ANSIPOL, Lembaga Partisipasi Perempuan, Kalyanamitra, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan, Women Research Institute, PD Politik, Indonesia untuk Kemanusiaan, Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI), Aman Indonesia, Indonesia Beragam, Yayasan Cahaya Guru, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), PEKKA, Migrant Care, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender seluruh Indonesia (APPHGI), INFID, Rahima, Association for Community Empowerment (ACE), Perkumpulan Rumpun, Sejiwa, LPBHP Saraswati, Sapa Institut – Bandung, YLBHI, MaPPI FH UI, LeIP, TURC, Masyarakat Akar Rumpun (MAKAR), Afy Indonesia, Rifka Annisa – Yogyakarta, IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia), SCN CREST (Semarak Cerlang Nusa), Aliansi Remaja Independen, Fahmina Institute, MITRA IMADEI, Yayasan Bakti Makassar, Yayasan Kesehatan Perempuan, Asosiasi PPSW, Jala PRT, Cahaya Perempuan WCC, Rumah KITAB, SEPERLIMA, PKWG UI, PRG UI, Kajian Gender UI, Flower Aceh, Perkumpulan Harmonia, Yayasan Nanda Dian Nusantara, ILRC, Mitra

Menurut mereka, upaya pemerintah dipandang sebagai upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih mentitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku dari pada memikirkan penggulangan kejahatan kekerasan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban. Selain itu, draft Perppu tersebut sangat sulit untuk diakses. Proses perancangan yang serba tertutup ini membuktikan pemerintah tidak lagi berkomitmen untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan mendorong upaya keterbukaan informasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya pendekatan untuk memperberat pidana bagi pelaku merupakan perspektif yang masih dipertahankan oleh pemerintah, sebagai contoh, revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014 juga mendasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya. Hasilnya, Pemerintah malah menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki masa genting karena maraknya kejahatan kekerasan seksual pada anak. Pendekatan pemberatan ini sesungguhnya merupakan pendekatan yang miskin data dan kajian dan dianggap sebagai bagian ilusi yang diajukan sebagai kampanye retorik dari pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki angka berapa rata-rata pelaku kejahatan seksual pada anak yang

dihukum pengadilan, berapa lama rata-rata tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, dan yang terpenting, berapa banyak pelaku yang mengulangi tindak pidananya.¹¹⁷

Selain alasan tersebut, setidaknya ada beberapa alasan lainnya yang dijadikan pegangan bagi aktivis HAM. Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Ketiga, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum

Religion and Peace (ICRP), PGI, YSSN Pontianak, Yayasan Setara Semarang, dan PKPA Medan.

¹¹⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, h. 4.

kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.¹¹⁸

3. Disahkannya Perppu: Bermuara pada Masalah

Meskipun banyak ormas keagamaan dan LSM yang menolak Perppu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak pada tanggal 25 Mei 2016. Dalam perppu tersebut dinyatakan pemberatan pidana berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan yakni bisa pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman bui 10 tahun hingga paling lama 20 tahun. Selain itu, diberlakukan pengumuman identitas pelaku. Kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan.

Sebagai warga Negara yang baik tentu mendukung apa yang telah diupayakan pemerintah. Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pegangan. *Pertama*, tentu kebijakan tersebut bermuara kepada masalah. Disahkannya Perppu oleh presiden dengan tujuan mencegah dan memberi efek jera kepada pelaku pedofilia merupakan langkah konkrit dalam upaya menjaga kemaslahatan. Upaya pencegahan merupakan bagian dari kaidah

¹¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, h. 13.

ushuliyah yakni *sadd al-dzara'i* dengan kaidah *dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih*. Selain itu, tindakan presiden dengan mengeluarkan Perppu sesuai dengan kaidah fikih *tasharuf al-imam ala al-raiyyah manutun bi al-mashlahah* yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berorientasi kepada maslahat.

Kedua, dalam keadaan darurat, perkara yang haram bisa dihalalkan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa Indonesia merupakan Negara darurat pelecehan seksual, maka hukuman kebiri (meskipun ulama klasik dan kontemporer menganggap haram untuk dilakukan) boleh dilakukan karena kondisi darurat. Sebagaimana dalam kaidah fikih, "*al-dharurat tubihul mahdzurat*". Dengan demikian, pemerintah sah-sah saja menjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus pedofilia. Namun, ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tentu dengan pertimbangan, tidak seluruh kasus akan mendapat hukuman kebiri. Hukuman kebiri dalam keadaan darurat kaidah fikih di atas, sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya, pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya, atau bila hasratnya tidak terpenuhi, ia bisa menghilangkan nyawa korban. Sarna kondisinya seperti seorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Sementara, ia tak menemui makanan yang halal. Kesimpulannya, pemberlakuan kebiri tak bisa

dipukul rata bagi semua pelaku. Di sinilah kearifan para fukaha dan hakim dalam berijtihad sangat diperlukan.¹¹⁹ *Ketiga*, tunduk pada aturan Negara merupakan kewajiban. Disahkannya Perppu sebagai aturan Negara merupakan bagian dari aturan Negara yang perlu diikuti. *Athiullah wa 'athiurrasul wa ulil amri minkum* menjadi acuan bagi warga Negara yang baik. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah tentunya menghilangkan polemik di masyarakat sebagaimana dalam kaidah "*hukmul hakim yarfaul khilaf*".

4. Eksistensi Perppu: Refleksi Kritis

Disahkannya Perppu tentu tidak serta merta tidak ada masalah. Setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi renungan bersama. *Pertama*, jika pemberatan pemberian hukuman ini diwujudkan, maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pidana bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang mencantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan.

Kedua, dengan diberlakukannya Perppu tidak menjamin akan berakhirnya tindakan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak. Pendidikan seks secara komprehensif menjadi perhatian serius. Pencegahan kekerasan seksual di masyarakat

¹¹⁹ Hannan Putra, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i*, Republlika,

harus dimulai dari keluarga dan pendidikan. Keluarga perlu membicarakan seksualitas secara terbuka dengan anak-anak, serta mengajari anak laki-laki dan anak perempuan untuk saling menghormati. Selain itu, perlunya pendidikan seks yang komprehensif di sekolah. Pendidikan yang kini ada menitik beratkan pada aspek biologis, yaitu bentuk dan fungsi organ reproduksi. Pendidikan seks harus membuat anak-anak memahami mana bagian tubuhnya yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh serta bagaimana menyatakan tidak, untuk menghindari tekanan dari teman-teman sebaya.

Ketiga, persoalan kekerasan seksual bukan *an sich* kekerasan karena alat kelamin. Apakah kemudian ketika seseorang melakukan kekerasan seksual memakai alat lain selain kelamin akan dikebiri? Seperti kasus Eno seorang perempuan pegawai pabrik di Tangerang berusia 18 tahun. Pada Jumat (13/05), korban ditemukan di dalam kamar kos dalam keadaan telanjang bulat dengan gagang cangkul tertancap di kemaluannya. Jika keadaan seperti ini, perilaku kekerasan seksual pada dasarnya bukan pada alat kelamin, tapi pola pikir. Jika pola pikirnya kotor, meskipun dikebiri, tindakan kotor bisa saja dilakukan seperti pada kasus Eno. Maka rehabilitas terhadap pelaku kejahatan seksual menjadi sebuah keharusan. Pencegahan terhadap pikiran kotor segera dihilangkan. Maka video porno dan konten porno yang terdapat dalam situs di internet harus

terus diblokir, meskipun satu situs diblokir seribu situs akan muncul.

Keempat, persoalan siapa yang berhak untuk menyuntik kebiri, dokter atau jaksa? Sampai saat ini, IDI tidak mau menyuntik kebiri karena dianggap menyalahi kode etik dokter. (Gunung Terang, 10 Agustus 2016 pukul 12:15 WIB)

C. Daftar Pustaka

Hannan Putra, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i*, Republika, Jumat 30 Oktober 2015.

<http://www.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807>, diakses pada 8/9/2016

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual, diakses pada 9/8/2016

<http://www.dw.com/id/inilah-provinsi-paling-rawan-pelecehan-seksual/g-19260614>, diakses pada 8/9/2016

KPAI: *Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil*, Sabtu, 10 Mei 2014. 19:18 WIB dalam <http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>. diakses pada Selasa, 9 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB.

Lihat tulisan penulis dengan judul "*Melawan (Gerak) Predator Anak*" yang pernah dimuat di Lampung Post. Dalam tulisan tersebut penulis menyatakan bahwa predator akan melahirkan predator baru. Predator baru tersebut adalah korban. Ini semacam pecah sel.

Susanto, *Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual: Perlukah?*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam diskusi FH UI

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), h. 10-13

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari , *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, h. 13.

LAMPIRAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Penetapan Perpu Kebiri



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Departemen dan Perundang-undangan,



Wang Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5946



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 81A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 82A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882